

BAB 3

PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai strategi kampanye yang digunakan PKS pada pemilihan legislatif tahun 2019 . Adapun strategi tersebut di ulas berdasarkan dengan kerangka teori *mix marketing* (pemasaran bauran) yang lebih dikenal dengan 4P meliputi produk, promosi, harga, serta penempatan/distribusi. Berikut pembahasan secara rinci mengenai 4P dalam strategi kampanye PKS.

A. Produk

1. Platform Partai : “Berkhidmat Untuk Rakyat”.

Sebagai partai yang sudah mengikuti pemilu untuk keempat kalinya, PKS menawarkan sebuah *platform* “Berkhidmat Untuk Rakyat” sesuai dengan hasil rapat akbar Fraksi PKS se-Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta pada hari Sabtu, 29 April 2017. Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan untuk memenangkan pemilu kunci kemenangannya yaitu selalu berkomitmen untuk mengokohkan khidmat kepada rakyat. Selain itu, mendengarkan aspirasi dari rakyat juga sangat penting untuk mendukung kunci kemenangan pada pemilu (Teropong Senayan, 29 April 2017).

“Kami tidak melihat ada cara lain untuk menang pemilu kecuali PKS dan seluruh pejabat publiknya termasuk anggota legislatif total berkhidmat untuk rakyat,” ujar Jazuli di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Sabtu 29 April 2017.

Perolehan suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 PKS mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada pemilihan legislatif sebelumnya. Partai dengan basis Islam tersebut lebih tegas sebagai partai oposisi dengan program unik yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai daya tarik pada pemilihan legislatif tahun 2019. Untuk mendukung *platform* partai tersebut, PKS menawarkan empat program yang akan dilakukan apabila PKS nantinya bisa lolos menuju parlemen. Program yang pertama yaitu pemberlakuan surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup. Kedua, penghapusan pajak kendaraan bermotor. Ketiga, perlindungan ulama, tokoh agama juga simbol agama. Serta yang terakhir yaitu penghapusan pajak bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan hingga Rp 8 juta (Tribun, 11 Maret 2019).

Yang dimaksudkan dengan program pajak sepeda motor ialah PKB (pajak kendaraan bermotor), PBBNKB (pajak bea balik nama kendaraan bermotor, biaya STNK (surat tanda nomor kendaraan), tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, serta biaya administrasi TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) dengan jenis kendaraan ber acc kecil. Selain itu, PKS dalam mengurangi beban rakyat berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemberlakuan SIM seumur hidup dan juga penghapusan pajak sepeda motor sesuai dengan yang dikatakan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzammil Yusuf di DPP PKS (Detik, 22 November 2018).

“Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat karena tarif dasar

listrik naik dan harga beras kualitas medium yang terus naik. Pengurangan beban sekecil apapun, termasuk misalnya pengurangan pajak (*tax cuts*) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut rakyat dengan gembira” (Detik, 22 November 2018).

Penghapusan pajak sepeda motor juga ditegaskan oleh Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman. Bagi Sohibul jika sebagian kelompok atas mampu menikmati pembebasan pajak melalui “*tax amnesty*” oleh karena itu sebagai masyarakat kecil juga berhak merasakan hak yang sama. Bagi PKS lebih utama dalam membela 100 juta hak ekonomi rakyat kecil pengguna sepeda motor ketimbang membela sekelompok *elite* dengan modal besar akan tetapi komitmen dengan bangsanya masih diragukan. Selain itu, Sohibul juga menyebutkan tugas yang paling utama negara ialah menciptakan rasa keadilan serta kesetaraan bagi semua warga negara (Bisnis, 24 Maret 2019).

PKS juga memacu Rancangan Undang-Undang terkait dengan perlindungan Tokoh Agama, Ulama, serta simbol Agama apabila mampu bersaing pada pemilihan legislatif tahun 2019. Hal tersebut dikatakan oleh Sohibul Iman di kantor DPP PKS setelah selesai acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Kami Dewan Pengurus Pusat PKS berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama-Agama pada periode 2019-2024 mendatang” kata Sohibul, 13 Januari 2019.

Sohibul menjelaskan alasan PKS dalam upaya mendorong RUU tersebut karena pertama, tokoh agama serta ulama rentan memperoleh ancaman baik secara fisik maupun nonfisik serta kriminalisasi yang

diakibatkan karena dakwah yang dibawakan. Kedua, PKS berpendapat tokoh agama serta ulama merupakan suatu kelompok yang juga ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan dan merumuskan dasar kehidupan dalam bernegara maupun berbangsa. Ketiga, PKS berpendapat bahwasanya tokoh agama serta ulama perlu mendapatkan perlindungan kebebasan ketika berdakwah menyampaikan ajaran agama. Selain itu, PKS juga mempunyai pandangan bahwa simbol agama merupakan sesuatu yang perlu untuk kita hormati dan juga untuk dimuliakan sesuai dengan ajaran agama bagi pemeluknya (Tempo, 14 Januari 2019).

Program terbaru yang ditawarkan PKS menjelang pemilihan legislatif 2019 yaitu pembebasan pajak pendapatan bagi buruh, karyawan, serta pegawai yang berpenghasilan di bawah 8 juta setiap bulannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Bidang Ekuitek DPP PKS Handi Risza di Kantor DPP PKS pada Kamis, 21 Februari 2019.

“Jika PKS memenangkan Pemilu 17 April 2019, kami memperjuangkan program pembebasan pajak penghasilan masyarakat atau pekerja, buruh, karyawan yang memiliki penghasilan hingga Rp 8 juta. Karena dalam beberapa tahun terakhir peningkatan upah gaji yang tidak sebanding kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan energi baik BBM atau tarif tenaga listrik menjadi penyebab utamanya” (Republika, 21 Februari 2019).

Handi menyebutkan melemahnya daya beli dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan pertumbuhan hanya sekitar 5 persen setiap tahunnya. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban ekonomi serta memperbaiki daya beli masyarakat Indonesia diperlukan

suatu terobosan baru yang tentunya memihak pada kalangan masyarakat. Program tersebut dianggap oleh PKS dimana populasi di Indonesia pada saat ini lebih didominasi oleh sebagian kelompok muda yang masih produktif sehingga sangat rentan gagal untuk masuk dalam jurang kemiskinan. Di sisi lain, kelompok muda ini tentu saja sangat berpotensi dalam menentukan kemajuan perekonomian di Indonesia apabila mampu dikelola dengan baik yang mampu mendorong demografi ekonomi di Indonesia mendatang (Republika, 21 Februari 2019).

Program-program tersebut tentu memicu banyak dukungan dari masyarakat yang setuju dengan isu-isu permasalahan yang ada di masyarakat. Ujang Komarudin, seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar menyebutkan bahwasanya PKS menggunakan strategi kampanye yang bermain cantik serta menarik disamping untuk meminimalisir adanya konflik internal dari PKS sendiri. Dengan tawaran program-program tersebut, harapannya bagi PKS tetap mampu meraih suara banyak di kalangan masyarakat (Cnn Indonesia, 24 Mei 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya *platform* PKS pada pileg 2019 yakni “Berkhidmat Untuk Rakyat”. Sedangkan untuk mendukung *platform* tersebut PKS menawarkan empat program yang diusung PKS diantaranya pemberlakuan SIM seumur hidup, penghapusan pajak kendaraan bermotor, penghapusan pajak penghasilan di bawah 8 juta. Selain itu, satu program lainnya terkait dengan perlindungan Ulama, Tokoh Agama, serta Simbol Agama.

2. *Past Record*

PKS pada pemilu 2004 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada pemilu 1999 yang awalnya bernama Partai Keadilan (PK) dan mengalami tidak lolos ambang batas parlemen. Suara yang diperoleh PKS pada tahun 2004 yaitu sebesar 7,34 persen bisa dikatakan mengalami lonjakan luar biasa dibandingkan pada pemilu sebelumnya yang hanya sebesar 1,36 persen. Tentu saja lonjakan tersebut merupakan suatu prestasi PKS sebagai buah manis apresiasi dari masyarakat pada kesederhanaan, kejujuran, serta kesantunan yang dimiliki para wakil rakyat Partai Keadilan (PK) tersebut (Kompasiana, 12 Mei 2014).

Suara yang diperoleh PKS pada pemilu 2004 mencapai 8.325.020 suara, bisa dikatakan 7,34 persen berdasarkan jumlah total keseluruhan suara nasional. Pada saat itu juga PKS mendapatkan alokasi kursi di parlemen sebanyak 45 kursi dan juga menduduki peringkat keenam partai yang mempunyai suara terbanyak. Presiden PKS yang menjabat waktu itu adalah Hidayat Nur Wahid yang kemudian terpilih menjadi ketua MPR dengan perolehan 326 suara yang mengalahkan suara Sutjipto sebesar 324 suara dari PDI-P. Terpilihnya Hidayat tersebut kemudian menyerahkan jabatannya sebagai Presiden PKS kepada Tifatul Sembiring (Kompas, 22 Februari 2018).

Sementara pada pemilu tahun 2009, PKS mengalami kenaikan suara di bawah kepemimpinan Tifatul Sembiring meraih total suara sebanyak 8.206.955 sebesar 7,88 persen. Hal perolehan tersebut tentu saja meningkatkan perolehan alokasi kursi di parlemen menjadi 57 kursi. Pada Pilpres 2009, PKS

mampu membawa SBY-Boediono menjadi Presiden pada periode kedua yang kemudian PKS mendapatkan jatah menteri di jajaran kabinet. Ditunjuknya Tifatul Sembiring menjadi Menteri Komunikasi dan Infomatika, membuat Tifatul harus menyerahkan jabatannya sebagai Presiden PKS kepada Luthfi Hasan Ishaq (Kompas, 22 Februari 2018).

Suksesnya PKS pada pemilu 2004 dan juga 2009 tidak berlanjut pada pemilu tahun 2014. PKS pada pemilu 2014 kehilangan 17 kursi di Senayan, sehingga tinggal memiliki 40 kursi saja. Selain itu juga PKS gagal memenangkan pasangan Prabowo-Hatta sehingga mengambil langkah sebagai partai oposisi selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Berdasarkan hitungan cepat Lembaga Survei Indonesia mendapatkan urutan keenam dengan perolehan suara 6,46 persen. Sedangkan versi Kompas mendapatkan perolehan suara sebesar 6,98 persen. Hal tersebut diungkapkan Kusrido Ambardi selaku Direktur Riset LSI yang menyebutkan PKS mengalami penurunan dikarenakan adanya isu korupsi Luthfi Hasan Ishaq mantan Presiden PKS yang terduga terlibat suap kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Merdeka, 12 April 2014).

“Sama seperti Demokrat, PKS juga terpukul dengan kasus-kasus korupsi sehingga menjadi sorotan publik yang luar biasa. Sehingga ada efek besar bagi partai ini,” ujar Kusrido saat berbincang dengan pihak Merdeka (11 April 2014).

PKS merupakan salah satu partai politik yang belum memiliki ketertarikan merekrut caleg dari kalangan artis seperti beberapa partai lain yang melonjakkan suara partai dengan mencalonkan artis. Bagi Anis Matta selaku

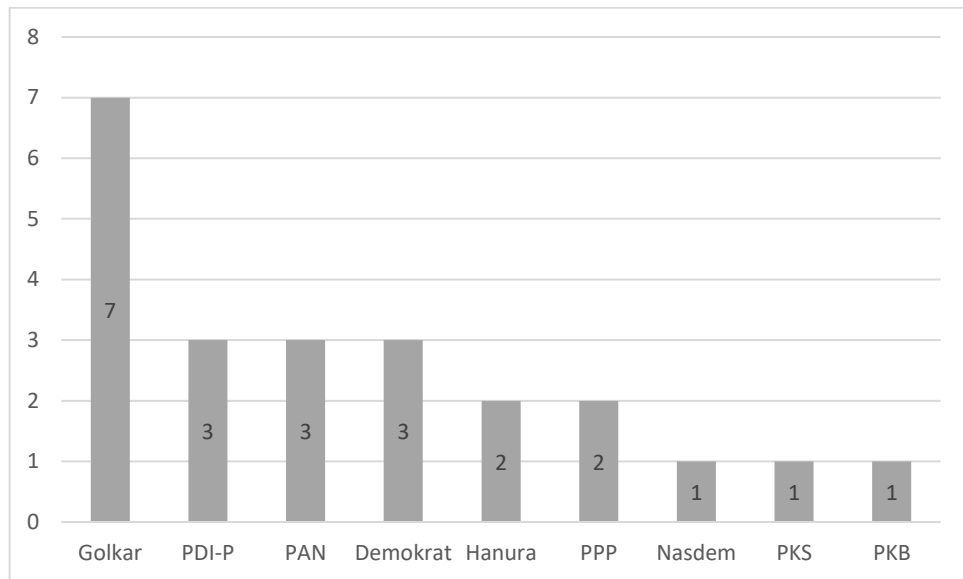
Sekjen PKS mengatakan partai yang merekrut artis sebagai caleg diibaratkan seperti *event organizer*.

“Untuk pencalegan PKS punya dua langkah, pertama konsisten dengan jalur kekaderan, karena dengan ini kita tidak mengubah partai jadi *event organizer*,” ujar Anis di Gedung DPR. (Detik, 16 Mei 2012).

Menurut Anis alangkah baiknya kalau caleg yang dicalonkan merupakan kader partai yang merupakan binaan dari internal partai itu sendiri. Berbeda dengan partai PKS yang sejauh ini belum ada rencana untuk merekrut artis, melainkan para caleg kandidat diambil melalui dua langkah yakni dari kader PKS dan juga merekrut tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang direkrutpun tidak sembarang, melainkan yang mempunyai kapasitas lebih baik dari kader PKS. Menurut Anis, tokoh masyarakat yang berkapasitas lebih baik dibandingkan dengan kader PKS tentu layak menjadi caleg PKS. Untuk persyaratannya tetap sama seperti caleg yang lainnya tidak ada perbedaan yang mendalam (Detik, 16 Mei 2012).

Selain prestasi-prestasi di atas, PKS juga merupakan partai dengan kader yang paling sedikit tertangkap oleh KPK. Berikut data jumlah anggota partai politik yang menduduki kursi di parlemen dan terseret kasus korupsi selama periode tahun 2014 – 2019.

Gambar 3.1 Tersangka Korupsi Anggota DPR 2014-2019



Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data ICW yang dimuat dalam berita Cnn Indonesia, 19 September 2019.

Berdasarkan data ICW (*Indonesia Corruption Watch*), ditetapkan sebanyak 23 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014-2019. Anggota dewan yang paling banyak tersandung kasus korupsi berasal dari Partai Golongan Karya sebanyak 7 orang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, dan juga Partai Amanat Nasional (PAN) juga tersandung kasus korupsi masing-masing partai berjumlah 3 orang. Untuk Partai Hanura dan PPP anggota yang tertangkap masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB masing-masing terdiri dari 1 orang yang tertangkap KPK. Anggota DPR yang menjadi tersangka tersebut sebagian besar menduduki jabatan yang sangat strategis. Sebagai contoh Ketua Umum Partai Golkar, Setyo Novanto yang juga menduduki sebagai Ketua

DPR, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy yang juga menjabat sebagai anggota DPR komisi III, serta Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Cnn Indonesia, 19 September 2019).

Selain itu, munculnya GARBI yang dilatarbelakangi dari konflik internal PKS memberikan wajah baru bagi sekelompok *elite* ternama. Faksi pertama yang dipelopori oleh Fahri Hamzah, Anis Matta, dan sejumlah tokoh generasi muda lainnya dan lebih dikenal dengan faksi sejahtera menghendaki PKS berbentuk organisasi serta kerja PKS berubah lebih terbuka lagi kedepannya sesuai dengan perkembangan kondisi demokrasi dan politik di Indonesia saat ini. Sedangkan faksi kedua dipelopori oleh kaum tua seperti Hilmi, Salim Segaf, Tifatul, Sohibul, Hidayat, dan lain sebagainya lebih dikenal sebagai faksi keadilan yang mempertahankan langgam organisasional PKS sejak rintisan awal mula menjadi partai politik yang berasal dari gerakan tarbiyah (Kompasiana, 05 November 2018).

Konflik antar kedua faksi tersebut mulai memanas ketika Presiden PKS dijabat oleh Anis Matta, serta Ketua Majelis Syuro dijabat oleh Hilmi Aminudin. Pada tahun 2015 Hilmi dikalahkan oleh Salim Segaf yang menjadi Ketua Majelis Syuro, dan dikabarkan oleh Hilmi bahwasanya Anis Matta berjuang untuk memenangkan Salim, akan tetapi pada kenyataannya Anis Matta dilengserkan oleh Salim kemudian ditunjuklah Sohibul Iman sebagai Presiden PKS. Sejak saat itulah satu per satu orang-orang Anis Matta yang menduduki jabatan penting di PKS dilengserkan. Seperti halnya Fahri Hamzah yang disuruh mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR RI. Untuk memberangus

GARBI tersebut juga mempunyai resiko besar bagi PKS dikarenakan sebagian caleg PKS tergabung menjadi anggota GARBI. Apabila mereka berhenti berjuang untuk mendapatkan kursi di parlemen, tentu akan membuat kerugian besar bagi PKS di Pemilu 2019 (Kompasiana, 05 November 2018).

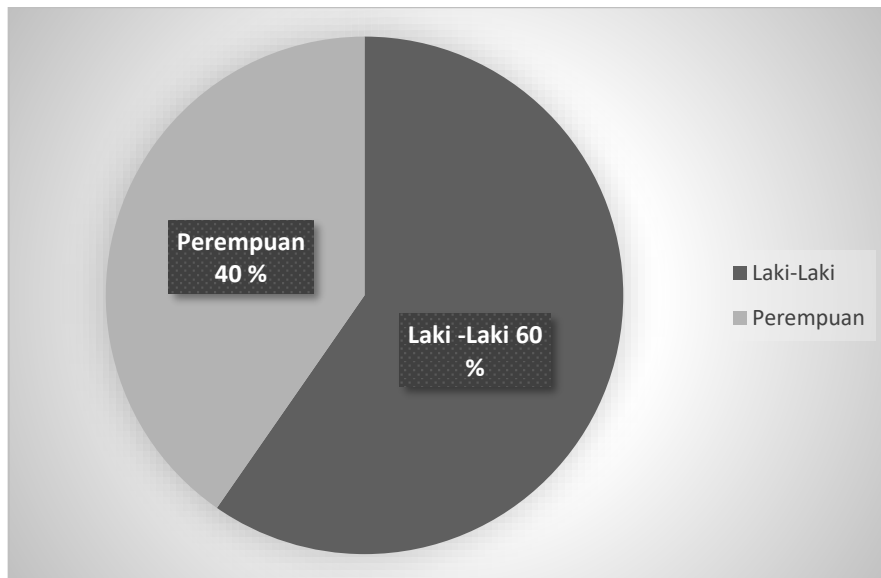
Berdasarkan uraian di atas, *past record* PKS yaitu pada pemilu 2004 mengalami lonjakan suara dibandingkan pada pemilu 1999 yang bernama PK dan mendapatkan alokasi kursi di parlemen sebanyak 45 kursi. Pemilu tahun 2009 alokasi kursi di parlemen sebanyak 57 kursi. Sedangkan pada pemilu 2014 adanya isu Lutfi Hasan yang terlibat kasus suap daging sapi sehingga kehilangan 17 kursi di parlemen menjadi 40 kursi. Berbeda dengan partai lain yang merekrut artis sebagai caleg, akan tetapi PKS konsisten pada kader serta tokoh masyarakat yang dicalonkan. Selain itu, PKS merupakan salah satu partai yang anggotanya lolos di parlemen paling sedikit tertangkap KPK dalam kasus korupsi periode 2014-2019 yakni hanya 1 orang.

3. Karakteristik Personal

Pada pemilihan legislatif tahun 2019, ketersediaan kursi di DPR RI sebanyak 575 kursi yang tersebar dalam 80 daerah pemilihan (dapil) di seluruh Indonesia. Sementara itu, sebanyak 50 caleg PKS yang berhasil lolos menuju Senayan dari 533 caleg yang menyalonkan diri. Berdasarkan 533 caleg tersebut, secara lebih rinci dapat digambarkan latar belakang mereka di bawah

ini berdasarkan jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, usia, hingga status perkawinan.

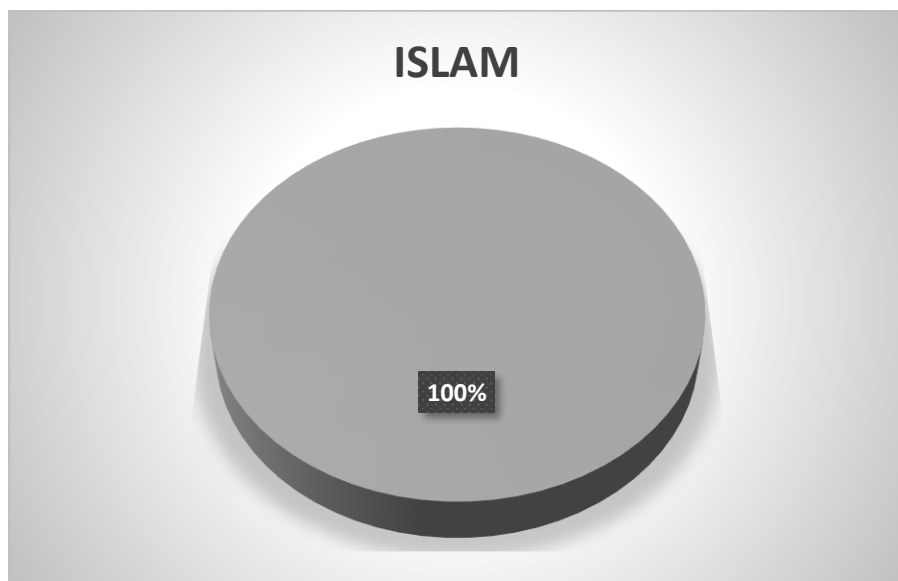
Gambar 3.2 Jenis Kelamin Caleg PKS DPR RI pada Pileg 2019 (%)



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data KPU RI (2019).

Gambar 3.2 menunjukkan bahwasanya PKS pada pemilihan legislatif tahun 2019 sudah mencapai ketentuan 30 persen representasi calon perempuan meskipun dapat dilihat berdasarkan data tersebut masih didominasi oleh caleg laki-laki. Berdasarkan gambar tersebut caleg laki-laki PKS DPR RI sebesar 60 persen (318 orang), sedangkan caleg perempuan sebesar 40 persen (215 orang). Adanya keterwakilan perempuan yang ikut serta mencalonkan diri membuktikan adanya representasi serta partisipasi dari kaum perempuan.

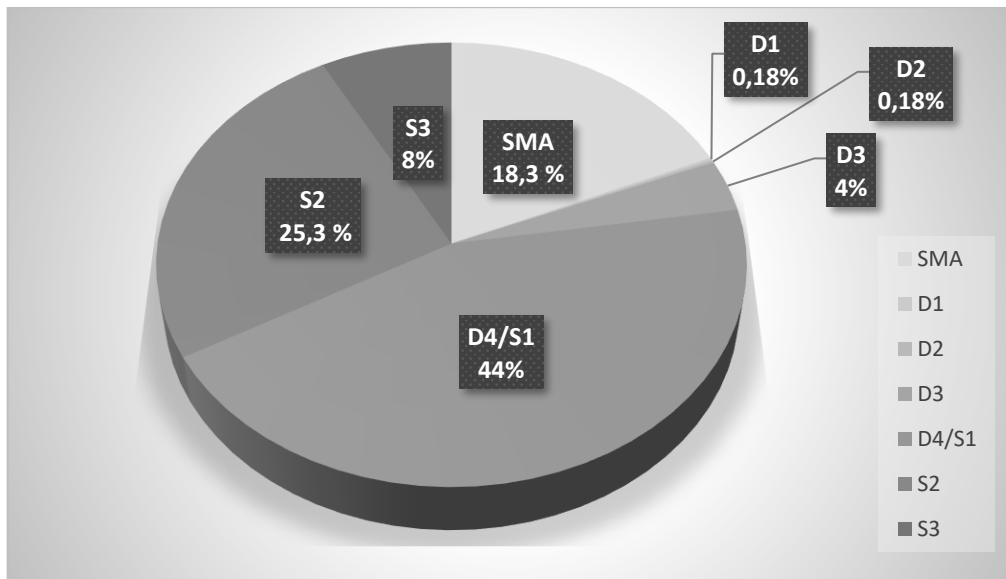
Gambar 3.3 Agama Caleg PKS DPR RI pada Pileg 2019



Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data KPU RI (2019).

Berdasarkan gambar 3.3 menunjukkan bahwasanya semua caleg PKS pada pemilihan legislatif tahun 2019 beragama Islam semua. Hal tersebut tentu menjadi karakteristik tersendiri bagi PKS dimana pada pemilihan legislatif tahun 2019 tidak ada satu salah satu yang berasal dari non Muslim. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan pada pemilu yang selanjutnya apakah semua caleg ber agama Islam atau ada yang non Muslim.

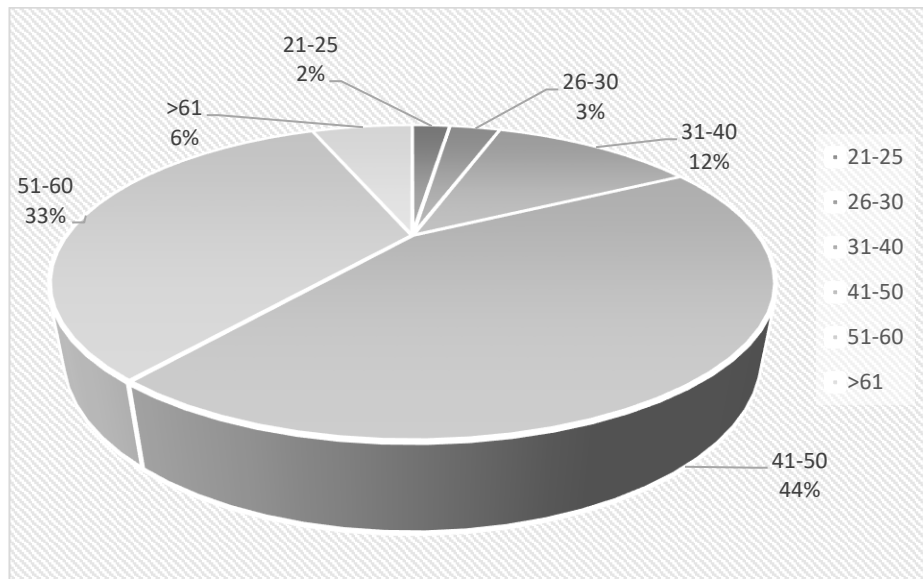
Gambar 3.4 Tingkat Pendidikan Caleg PKS DPR RI pada Pileg 2019 (%)



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data KPU RI (2019).

Gambar 3.4 menunjukkan bahwasanya mayoritas caleg DPR RI PKS yaitu lulusan D4/Sarjana sebesar 44 persen (236 orang). Urutan kedua yaitu caleg lulusan Magister sebesar 25,3 persen (133 orang). Kemudian caleg lulusan SMA sebesar 18,3 persen (101 orang). Selanjutnya caleg lulusan S3 sebanyak 8 persen (42 orang), serta lulusan D3 sebesar 4 persen (19 orang). Sedangkan lulusan D1 dan D2 sama yaitu sebesar 0,18 persen (caleg masing-masing 1 orang). Secara umum, berdasarkan data tersebut menunjukkan tingkat pendidikan caleg DPR RI PKS pada pemilihan legislatif tahun 2019 merupakan masyarakat yang telah berpendidikan sehingga mempunyai wawasan yang luas.

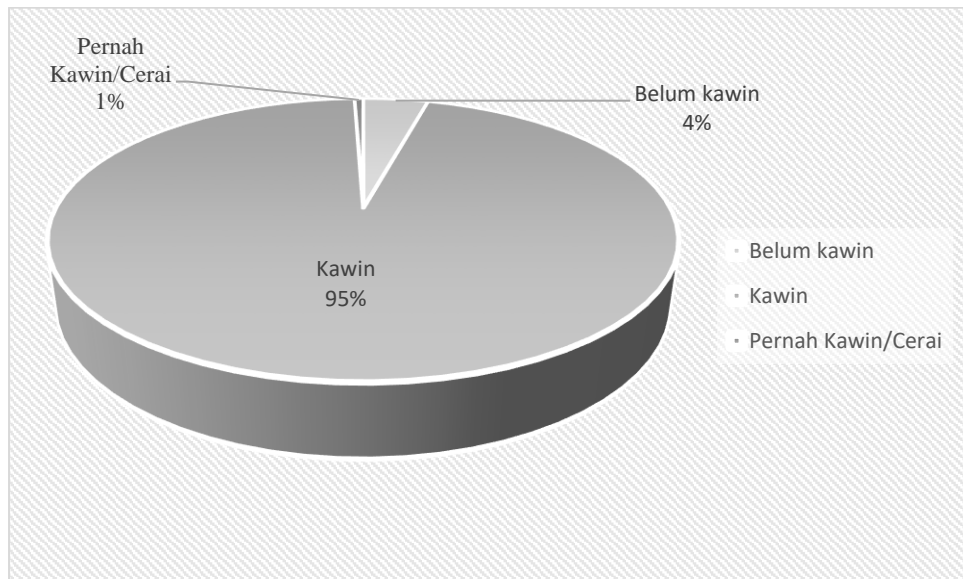
Gambar 3.5 Usia Caleg PKS DPR RI pada Pileg 2019



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data KPU RI (2019).

Berdasarkan gambar 3.5 menunjukkan bahwasanya caleg PKS yang masih berusia 21-25 tahun yakni sebanyak 12 orang (2 persen). Caleg dengan usia 26-30 tahun sebanyak 16 orang (3 persen). Usia 31-40 tahun sebanyak 64 orang (12 persen), caleg usia 41-50 tahun sebanyak 232 orang (44 persen). Sedangkan caleg berusia 51-60 tahun sebanyak 177 orang (33 persen). Adapun caleg yang berusia diatas 60 tahun sebanyak 32 orang (6 persen). Hal tersebut dapat kita lihat mayoritas caleg PKS berusia 41-50 tahun.

Gambar 3.6 Status Perkawinan Caleg PKS DPR RI pada Pileg 2019



Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data KPU RI (2019).

Berdasarkan gambar 3.6 menunjukkan bahwasanya mayoritas caleg PKS sudah menikah yakni sebesar 95 persen atau sebanyak 508 orang yang terdiri dari 312 caleg laki-laki serta 196 caleg perempuan. Caleg yang belum menikah sebesar 4 persen, sebanyak 22 orang yang terdiri dari 8 caleg laki-laki dan 14 caleg perempuan. Caleg PKS yang berstatus pernah menikah baik cerai ataupun ditinggal meninggal sebanyak 1 persen yang terdiri dari 1 caleg laki-laki dan juga 2 caleg perempuan.

Tabel 3.1 Latar Belakang Profesi Caleg PKS DPR RI pada Pileg 2019

No	Latar Belakang Caleg	Jumlah	Prosentase
1	Pengusaha/wirausaha/pekerja swasta/wiraswasta/IRT	367	69%
2	Petahana/mantan anggota DPR,DPD,DPRD	67	12,50%
3	Akademisi: dosen, guru, tenaga pendidik	36	6,80%
4	Pensiunan PNS	14	2,60%
5	Mahasiswa	10	2%
6	Profesi hukum : advokat, konsultan, free lance konsultan, notaris, pengacara	9	2%
7	Kesehatan: dokter, apoteker,	5	0,90%
8	Staff/tenaga ahli di lembaga legislatif	4	0,70%
9	Pekerja sosial/pemerhati sosial/penggiat kemanusiaan	3	0,50%
10	Militer : Purnawirawan TNI-Polri, Anggota legiun veteran RI	3	0,50%
11	Tidak terpublikasi	15	2,80%
TOTAL		533	100%

Sumber: Diolah dari data KPU RI (2019).

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa mayoritas caleg PKS mempunyai latar belakang berasal dari kalangan pengusaha dengan profesi pekerjaan yang berbeda-beda. Hampir dari seluruh daerah pemilihan di Indonesia yang terdiri dari 80 dapil terdiri dari caleg pengusaha. Dari 80 daerah pilihan tersebut, caleg dari kalangan pengusaha terbanyak berada pada daerah pilihan Jawa Timur I sebanyak 9 orang, selanjutnya masing-masing daerah pilihan yang terdiri dari 8 caleg dari kalangan pengusaha yaitu daerah pilihan Jawa Barat VII, Jawa Barat VIII, Jawa Tengah I, Jawa Timur V, Jawa Timur VI, Jawa Timur VII, Lampung I, serta Lampung II. Daerah pemilihan yang hanya terdiri dari 1

caleg dari kalangan pengusaha yaitu Bali, Banten I, DKI Jakarta I, Gorontalo, Kalimantan Barat II, serta Maluku.

Latar belakang caleg dari kalangan petahana atau mantan anggota DPR, DPD, DPRD sebanyak 67 yang terdapat di 43 daerah pemilihan. Hal tersebut tentu menunjukkan caleg dari kalangan petahana atau mantan anggota legislatif melebihi 50 persen dari 80 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Berdasarkan perolehan alokasi suara PKS dari 50 caleg yang lolos ke Senayan terdiri dari 33 caleg petahana/mantan anggota legislatif baik tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional. Hal tersebut membuktikan caleg petahana masih mempunyai peran yang signifikan di kalangan masyarakat sehingga mampu bersaing dengan caleg lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui karakteristik personal dari 533 caleg PKS terdiri dari 318 caleg laki-laki atau sebesar 40 persen, sedangkan caleg perempuan sebanyak 215 caleg atau sebesar 60 persen dan semua caleg PKS beragama Islam. Mayoritas caleg PKS berpendidikan D4/S1, dan sudah kawin. Selain itu, berdasarkan 533 caleg lebih dominan berusia 41-50. Walaupun mayoritas caleg berprofesi sebagai pengusaha, akan tetapi caleg petahana/mantan anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten sebanyak 67 orang. Dari 533 caleg hanya 50 caleg yang berhasil lolos ke Senayan dan 33 diantaranya merupakan caleg petahana/mantan anggota legislatif.

B. Harga

1. Harga Ekonomi

Setiap partai politik yang mengikuti pemilu tahun 2019 wajib melaporkan hasil penerimaan serta pengeluaran dana kampanye kepada KPU RI. Selama proses pemilu setiap partai politik wajib untuk melaporkan dana sebanyak tiga kali yang terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) serta yang terakhir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilakukan pada tanggal 26 April – 02 Mei 2019. Dana kampanye yang dikeluarkan PKS sebesar 150 miliar dan menduduki urutan ke 7 terbesar dana kampanye yang dikeluarkan dari 16 partai politik peserta pemilu (Moneysmart, 08 Mei 2019).

Berdasarkan laporan yang telah masuk kepada KPU RI, Subiyanto (Biro Hukum KPU) menyatakan bahwasanya PKS merupakan partai yang pertama kali menyerahkan laporan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye kepada KPU tepatnya di Hotel Borobudur.

“Selama periode penerimaan LPPDK ini, yang dibuka dari tanggal 26 hingga 2 Mei nanti, baru satu parpol yang menyerahkan laporan yaitu PKS, PKS ini memang yang paling cepat dalam menyampaikan laporan,” ungkap perwakilan Biro Hukum KPU, Rahmat Subiyanto, dalam siaran pers yang diterima Republika, Minggu, 28 April 2019.

Selain paling awal mengumpulkan, laporan keuangan PKS juga disebutkan paling rapi dari pada partai lainnya. Semua caleg yang terdiri dari 533 orang telah melaporkan dana kampanye sebesar 138 miliar, sedangkan dana kampanye partai sebesar 12 miliar (Republika, 28 April 2019). Akan

tetapi, berdasarkan olahan data penulis secara manual mengalami perbedaan sebesar Rp. 600.000,00 dimana laporan keuangan yang diserahkan kepada KPU sebesar Rp. 150.025.870.027,00 dan hitungan penulis sebesar Rp. 150.025.270.027,00. Perbedaan tersebut tidak begitu berpengaruh secara signifikan terkait biaya kampanye.

Sebanyak 533 caleg untuk DPR RI dari PKS, salah satu caleg yang merupakan penyumbang dana kampanye terbesar ke partai yaitu Drs. H. Adang Daradjatun (caleg DKI Jakarta III no urutan 2). Berdasarkan data KPU RI, sumbangan dana Adang sebesar 3,6 Miliar lebih tepatnya Rp. 3.657.500.000,00. Setelah Adang, penyumbang dana kampanye terbesar kedua yaitu Ir. H. Tifatul Sembiring (caleg dapil Sumatera Utara I no urutan 1), dengan biaya kampanye sebesar 2 Miliar lebih tepatnya Rp. 2.080.000.000,00.

Pada pemilihan legislatif 2019, caleg PKS yang mampu lolos menjadi anggota legislatif DPR RI terdapat 50 orang dari 533 caleg. Dari 50 orang tersebut, terdapat 28 orang merupakan caleg petahana pada pileg 2019 yang sebelumnya telah menduduki kursi di parlemen Senayan. Sementara itu terdapat 22 caleg pendatang baru yang dinyatakan lolos ke parlemen. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sumbangan Dana untuk PKS dari Caleg DPR RI yang Terpilih

No	Nama	Dapil	No Urut	Perolehan Suara	Sumbangan Dana (Rp)
Caleg Petahana yang Kembali Terpilih					
1	Drs. H. Adang Daradjatun	Dki Jakarta III	2	115,649	3.657.500.000
2	Ir. H. Tifatul Sembiring	Sumatera Utara I	1	127,223	2.080.000.000
3	H. Ecky Awal Mucharam	Jawa Barat III	1	106,044	2.000.000.000
4	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid	Dki Jakarta II	1	281,372	1.670.000.000
5	Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari	Jawa Tengah V	1	61,327	1.550.000.000
6	Dr. H. Jazuli Juwaini	Banten II	1	68,538	1.526.573.000
7	Mahfudz Abdurrahman	Jawa Barat VI	1	161,509	1.520.984.000
8	Dr. Kh. Surahman Hidayat	Jawa Barat X	1	113,376	1.465.915.000
9	H. Ansory Siregar	Sumatera Utara III	1	71,133	1.355.480.000
10	Drs. Chairul Anwar	Riau I	1	75,348	1.254.250.000
11	Ir. H.A. Junaidi Auly	Lampung II	1	44,549	1.189.149.000
12	Ir. H. Sigit Sosiantomo	Jawa Timur I	1	45,775	1.166.125.000
13	Habib Aboe Bakar Alhabsyi	Kalimantan Selatan I	1	103,515	1.155.247.500
14	Dr. H. Mardani	Dki Jakarta I	1	155,285	1.100.000.000
15	H. Muhammad Nasir Djamil	Aceh II	1	55,691	1.096.400.000
16	H. Nurhasan Zaidi	Jawa Barat IX	1	45,791	1.063.585.200
17	Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah	Banten I	1	67,15	1.050.000.000
18	H. Mustafa Kamal	Sumatera Selatan I	1	59,652	990.000.000
19	Dr. H. Andi Akmal Pasluddin	Sulawesi Selatan II	1	66,34	982.650.000
20	Drs. H. Almuzzammil Yusuf	Lampung I	1	71,441	927.747.000
21	Hj. Ledia Hanifa	Jawa Barat I	1	117,555	900.000.000
22	H. Iskan Qolba Lubis	Sumatera Utara II	1	62,877	859.375.000
23	Kh. Toriq Hidayat	Jawa Barat XI	2	69,056	836.825.000
24	Dr. H. Adang Sudrajat	Jawa Barat II	1	93,014	795.500.000
25	Dr. H. Sukamta	D.I.Yogyakarta	1	73,425	761.326.075
26	Dr. Hermanto	Sumatera Barat I	1	50,146	664.747.100
27	Drh. H. Slamet	Jawa Barat IV	1	51,403	550.000.000
28	Kh. Aus Hidayat Nur	Kalimantan Timur	1	51,409	466.177.500
Caleg Pendaftar Baru Yang Terpilih					
29	Dr. H. Fahmy Alaydroes	Jawa Barat V	1	67,677	1.676.498.000
30	Dr. Hj. Netty Prasetyani	Jawa Barat VIII	1	57,047	1.468.683.000
31	Saadiah Uluputty	Maluku	2	46,011	1.456.375.000
32	Hj. Nur Azizah Tahmid	Jawa Barat VI	3	63,963	1.370.000.000

33	Rafli	Aceh I	2	36,596	1.250.850.000
34	Dr. H. Abdul Fikri Faqih	Jawa Tengah IX	2	48,216	1.013.190.000
35	Drs. Hamid Noor Yasin	Jawa Tengah IV	3	55,704	998.350.000
36	Hj. Nevi Zuairina	Sumatera Barat II	2	52,141	963.934.000
37	Rofik Hananto	Jawa Tengah VII	1	108,339	899.233.950
38	Dr. H. Mulyanto	Banten III	1	74,772	850.000.000
39	Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati	Dki Jakarta II	2	24,294	775.000.000
40	Ahmad Syaikhu	Jawa Barat VII	1	147,573	767.182.200
41	Hj. Sakinah Aljufri	Sulawesi Tengah	1	50,305	657.750.000
42	Kh. Bukhori	Jawa Tengah I	1	52,79	650.000.000
43	H. Syahrul Aidi Maazat	Riau II	2	68,92	551.800.000
44	Amin Ak	Jawa Timur IV	1	36,349	512.500.000
45	H. Johan Rosihan	Nusa Tenggara Barat I	1	46,293	457.750.000
46	H. Suryadi Jaya Purnama	Nusa Tenggara Barat II	1	61,979	448.337.640
47	H Alifudin	Kalimantan Barat I	1	45,516	350.000.000
48	Teddy Setiadi	Jawa Barat I	2	27,862	330.000.000
49	Dr. Hj Anis Byarwati	Dki Jakarta I	2	39,935	194.812.010
50	H.Hidayatullah	Sumatera Utara I	4	31,067	30.000.000

Sumber: Diolah dari data KPU RI (2019).

Berdasarkan Tabel 3.2 menggambarkan dari 50 caleg PKS yang berhasil lolos menuju Senayan pada pemilu 2019 untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan data tersebut dapat kita cermati bahwasanya semua caleg telah melaporkan sumbangan dana kepada PKS. Fahmy Alaydroes merupakan caleg pendatang baru yang berhasil lolos dengan pengeluaran dana sumbangan kepada partai sebesar Rp. 1.676.498.000 rupiah. Adapun caleg yang berhasil lolos dengan biaya sumbangan terkecil yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 atas nama Hidayatullah berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara I.

Keterbatasan biaya yang dimiliki oleh Hidayatullah tidak mengecilkkan tekad Hidayatullah untuk menuju Senayan. Berpengalaman pada pemilu 2014, Hidayatullah yang juga dicalonkan sebagai caleg DPR RI pada dapil yang sama namun hanya mendapatkan suara sebesar 20.000. Sementara untuk bisa lolos

menduduki kursi kedua harus mendapatkan minimal 30.000 suara (Medan Bisnis, 19 Juni 2019).

“Dengan hitungan itu berarti saya harus mendapatkan 35.000 suara di pemilu kali ini agar bisa dapat kursi kedua dari PKS,” kata Hidayat pada hari Selasa, 18 Juni 2019 (Medan Bisnis, 19 Juni 2019).

Akibat dari keterbatasan biaya yang dimiliki, tidak semua wilayah dikunjungi Hidayat untuk bertemu langsung dengan masyarakat mencari dukungan. Hanya di Medan dan sejumlah wilayah di Deli Serdang yang di kunjunginya. Bahkan di Serdang Bedagai dan juga Tebing Tinggi hanya disapa melalui media sosial karena sama sekali tidak dikunjungi Hidayatullah. Dengan kunjungan Hidayatullah yang pernah menduduki sebagai anggota DPRD Sumatera Utara selama dua periode yakni 2004-2014 kepada masyarakat berhasil mendapatkan suara sebanyak 31.000 suara di pileg 2019 dan suara partai sebanyak 315.000. Dengan perhitungan menggunakan metode *sainte lague*, Hidayat mendapatkan alokasi kursi di DPR yakni pada urutan kursi kesepuluh (Medan Bisnis, 19 Juni 2019).

“Sebenarnya secara rasional di luar kalkulasi saya bisa lolos dapat kursi DPR RI. Saya tidak punya daya dukung sekuat Pemilu 2014, di mana waktu itu masih berstatus anggota DPRD Sumut. Kalau kemudian ternyata lolos, ini ada campur tangan Yang Kuasa,” ucap Hidayatullah.

Besaran dana yang dikeluarkan caleg kepada partai tersebut belum termasuk total biaya yang dikeluarkan caleg secara keseluruhan untuk melakukan kampanye di masyarakat. Seperti halnya caleg Dapil Jakarta II Hidayat Nur Wahid yang telah mengeluarkan biaya kampanye sekitar 1,6

Miliar. Walaupun menjadi caleg petahana, Hidayat tetap aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahkan juga berkampanye menggunakan alat peraga (Kompas, 13 April 2019).

“Tidak ada yang baru (dalam kampanye) karena yang saya lakukan selama masa kampanye ini sesungguhnya mengintensifkan dan melanjutkan apa yang selama ini saya kerjakan sebagai wakil rakyat, ketemu konstituen, menyerap aspirasi mereka, memperjuangkan aspirasi mereka, berkomunikasi dengan mereka,” ujar Hidayat kepada pihak Kompas, pada hari Sabtu, 13 April 2019.

Hidayat dalam berkampanye kepada masyarakat turun hingga ke RT, RW, dan juga komunitas-komunitas. Setiap harinya dia melakukan kampanye di lima sampai enam titik selama 6 bulan kira-kira sudah 1.900 titik yang telah ia kunjungi. Biaya kampanye untuk di lapangan yang dikeluarkan Hidayat sebesar Rp. 600-700 juta, sedangkan biaya alat peraga yang dikeluarkan sebesar 1 Miliar. Untuk itu biaya yang dikeluarkan Hidayat hingga lolos ke Senayan sebesar 1,6 Miliar (Kompas, 13 April 2019).

Berbeda dengan Abdul Kharis Al Masyhari, Ketua Komisi I DPR RI yang terpilih kembali pada pemilihan legislatif 2019. Caleg yang berasal dari Purworejo tersebut mampu menarik suara dari masyarakat di dapil Jawa Tengah V diantaranya Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, serta Kabupaten Boyolali. Kunci keberhasilan Abdul yakni rajin melakukan kunjungan kepada masyarakat khususnya pada daerah pemilihan tersebut sehingga terjadi interaksi dialog kepada masyarakat, membangun jaringan dalam bentuk massa sehingga menarik simpati masyarakat untuk memberikan suaranya pada April 2019 (Antara, 28 Mei 2019).

“Dengan memiliki basis massa dan jaringan, serta rajin berdialog dengan masyarakat di dapil, maka kita menjadi populer dan memiliki elektabilitas tinggi,” katanya (Antara, 28 Mei 2019).

Bagi Abdul sendiri, caleg yang mempunyai kemampuan finansial akan tetapi tidak pernah melakukan dialog langsung kepada masyarakat tentu akan sulit mendapatkan suara. Ketika diwawancarai oleh pihak antara, anggota DPR komisi I ini yang sekaligus sebagai pengusaha percetakan memberikan gambaran biaya yang dia keluarkan selama kampanye sebesar 2 Miliar (Antara, 28 Mei 2019).

Lain halnya dengan Caleg muda dapil Jawa Barat VII meliputi Purwakarta, Bekasi dan juga Karawang yang menjadi staff ahli di Parlemen selama 8 tahun yaitu Pipin Sopian. Pipin maju dalam pemilihan legislatif 2019 ini bukan atas dasar kemauannya sendiri, melainkan diusung oleh PKS. Ketika ditunjuk pimpinan PKS untuk maju di pileg, Pipin merasa percaya diri karena sudah tau akan fungsi-fungsi legislasi baik dari segi pengawasan, penyusunan anggaran, maupun dari segi rancangan undang-undangnya (Detik, 21 Maret 2019).

“Saya punya komitmen mengubah citra DPR sebagai lembaga terkorup. Itu adalah reputasi buruk DPR sampai saat ini,” ujar Pipin ketika ditemui Tempo, Selasa, 14 Agustus 2018.

Komitmen Pipin untuk menjadi anggota legislatif tidak terlepas dari sosok idola dari salah satu anggota DPR Fraksi PKS yakni Almuzammil Yusuf. Selama masa kampanye berlangsung, Pipin mengaku hanya menghabiskan dana sekitar 100 sampai 200 juta dimana dana tersebut

mayoritas ialah sumbangan. Akan tetapi, keyakinan Pipin tersebut walaupun sudah berpengalaman menjadi staff ahli di DPR pada kenyataannya tidak mampu lolos menuju Senayan (Detik, 21 Maret 2019).

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwasanya PKS merupakan partai yang pertama kali menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU. Berdasarkan laporan dana kampanye PKS sebesar 150 Miliar yang berasal dari sumbangan 533 caleg sebesar 138 Miliar, serta biaya lain partai sebesar 12 Miliar. Penyumbang dana terbesar berasal dari caleg DKI dapil 3, Adang Daradjatun sebesar 3,6 Miliar. Sedangkan biaya paling kecil sebesar 30 juta yakni Hidayatullah caleg Sumatera Utara dapil 1. Selain itu, terdapat beberapa caleg di luar dana sumbangan caleg yang dilaporkan kepada KPU yaitu Hidayat Nur Wahid sebesar 1 Miliar, dan juga Abdul Kharis sebesar 2 Miliar.

2. Harga Psikologis

Harga Psikologis disini menjelaskan mengenai strategi para caleg pada daerah pemilihan dimana PKS mengalami keunggulan dibandingkan dengan partai lain. Setiap caleg PKS tentu mempunyai strategi kampanye yang berbeda-beda diantara caleg satu dengan caleg yang lain terutama dalam hal pendekatan dengan pemilih, termasuk juga bagaimana kemampuan para caleg membuat psikologi bagi para pemilih merasa nyaman sehingga memberikan hak suaranya kepada caleg tersebut. Berdasarkan profil para caleg PKS yang

telah dipaparkan pada bagian produk, hasil pemilihan legislatif tahun 2019 secara nasional menunjukkan bahwasanya PKS unggul pada 3 dapil dari 80 dapil di seluruh Indonesia. Adapun ketiga dapil tersebut yaitu sebagai berikut :

1. JAWA BARAT I meliputi 2 Kabupaten/Kota diantaranya Kota Bandung dan Kota Cimahi.
2. JAWA BARAT VI meliputi 2 Kota diantaranya Kota Bekasi dan Kota Depok.
3. SUMATERA BARAT II meliputi 2 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Padang Pariaman dan juga Kota Pariaman.

Dari ketiga dapil tersebut, dapat diketahui bahwa PKS unggul pada basis Umat Islam yang cukup kuat. Hal tersebut menunjukkan PKS merupakan partai Nasionalis yang menggerakkan aktivis dakwah Islam. Dakwah tersebut kemudian menjadi poros utama dari seluruh gerak partai dan juga sebagai karakteristik dalam berpolitik terutama di Jawa Barat dan Sumatera Barat yang secara langsung pendekatan Islamnya sangat kuat.

Selain itu, dapat dicermati pula mengenai latar belakang profesi para caleg PKS yang telah berhasil merebut suara pemilih sehingga unggul di dapil tersebut dan lolos menuju Senayan. Secara lebih detail, profesi para caleg yang unggul pada tiga dapil tersebut dapat diuraikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Profesi Caleg PKS yang Unggul di Tiga Dapil

No	Nama Dapil	Perbandingan Besaran Kursi dan Jumlah Caleg PKS		Latar Belakang Caleg
		Besaran Kursi di Dapil	Jumlah Caleg PKS	
1	Jawa Barat I	7	7	5 pengusaha
				2 anggota legislatif
2	Jawa Barat VI	6	6	3 akademisi
				2 pengusaha
				1 petahana
3	Sumatera Barat II	6	6	4 pengusaha
				1 petahana
				1 pensiunan PNS

Sumber: Diolah oleh Penulis dari data KPU RI (2019).

Tabel 3.3 menunjukkan, bahwa latar belakang profesi caleg PKS didominasi dari kalangan anggota legislatif dan juga pengusaha. Bahkan di dapil Jawa Barat 1 kedua caleg yang berhasil lolos semuanya berlatar belakang profesi sebagai anggota legislatif semua, Jawa Barat VI terdiri dari 1 anggota legislatif dan juga 1 pengusaha. Yang terakhir dapil Sumatera Barat II caleg yang lolos juga dari seorang pengusaha. Hal tersebut membuktikan mayoritas caleg PKS didominasi dari kalangan anggota legislatif dan juga dari kalangan pengusaha.

Tabel 3.4. Jumlah Suara dan Caleg Terpilih dimana PKS Unggul di Tiga Dapil

No	Nama Dapil	Suara Sah PKS	Caleg Yang Terpilih
1	Jawa Barat I	339.115 (20 %)	Hj. Ledia (117.555 suara)
			Teddy (27.862 suara)
2	Jawa Barat VI	476.165 (22 %)	Mahfudz (161.509 suara)
			HJ. Nur Azizah (63.963 suara)
3	Sumatera Barat II	270.107 (21 %)	HJ. Nevi (52.141 suara)

Sumber : Diolah dari data KPU RI (2019).

Keunggulan suara PKS pada tiga dapil tentu saja tidak lepas dari peran masing-masing caleg didalamnya dalam melakukan kampanye politik di masyarakat. Tentu saja peran dari semua caleg baik yang mampu lolos menuju Senayan maupun yang gagal menuju Senayan sama-sama berkontribusi mengangkat suara PKS di urutan yang paling atas pada ke tiga dapil tersebut.

Ledia Hanifa salah satu Caleg Petahana Dapil Jawa Barat I yang lolos menuju parlemen bukanlah pengalaman baru yang dihadapi untuk memenangkan suara di dapil neraka tersebut. Bisa dikatakan dapil neraka karena banyak caleg dari partai politik lain yang mencalonkan sejumlah artis untuk bersaing dapil tersebut. Hal tersebut tentu saja tidak mempengaruhi Ledia untuk mempertahankan kemenangannya dua periode sebelumnya di dapil Jawa Barat I. Tentu saja, Ledia mempunyai strategi-strategi khusus untuk mempertahankan kemenangannya selama ini guna mendapatkan simpati dari masyarakat sehingga memberikan hak suaranya untuk memilih Ledia. Selama ini, pihak kemenangan dari Ledia selalu memperkuat jaringan struktur partai karena begi Ledia menjadi peserta Pileg bukanlah masalah perorangan melainkan parpol (Sindo, 14 Agustus 2019).

“Kita perkuat jaringan lewat program-program yang sudah dilakukan, seperti majelis taklim, posyandu, berbagai komunitas, dan lainnya,” ujar Ledia melalui sambungan telepon kepada pihak Sindo, 14 Agustus 2019.

Selain mendapatkan suara terbanyak di tiga dapil, suara PKS juga memperoleh suara banyak pada urutan kedua yang tersebar di 7 dapil dari 80

dapil di Indonesia. Adapun tujuh dapil tersebut diantaranya dapil DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, Jawa Barat III, Jawa Barat IV, Jawa Barat X, Nusa Tenggara Barat I, serta Riau I. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya PKS juga berhasil mendapatkan suara banyak di Jakarta dan juga Jawa Barat.

Selain mendapatkan posisi pertama dan kedua, PKS juga berhasil mendapatkan suara di posisi yang ketiga sebanyak 10 dapil dari 80 dapil. Adapun dapil tersebut diantaranya Banten I, Banten II, DKI Jakarta II, Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Tengah IV, Kalimantan Selatan I, Nusa Tenggara Barat II, Sumatera Utara I. Berdasarkan 10 dapil tersebut menunjukkan bahwasanya PKS mayoritas unggul di urutan ketiga yang tersebar di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya PKS unggul pada 3 dapil dari 80 dapil se-Indonesia yakni dapil Jawa Barat 1, Jawa Barat 6, serta Sumatera Barat 2. Ledia salah satu caleg yang lolos dapil Jawa Barat melakukan penguatan masyarakat sampai struktur bawah melalui Majelis Taklim, Posyandu, serta komunitas. Selain unggul di 3 dapil, PKS juga unggul pada urutan kedua di 10 dapil dan juga unggul 10 dapil pada urutan ke tiga dari 16 partai peserta pemilu.

3. Harga Citra

Membicarakan mengenai citra PKS pada pemilihan legislatif tahun 2019 tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan program-program yang dijanjikan

kepada masyarakat. PKS bermain cantik di pemilihan legislatif tahun 2019 dengan mengangkat isu-isu strategis yang ada di lingkungan masyarakat sehingga menarik perhatian serta simpati kepada partai. Sohibul Iman selaku Presiden PKS menyatakan tiga program prioritas yang diusung pada Pemilu 2019 yaitu pemberlakuan SIM seumur hidup, Pemberlakuan STNK gratis, serta penghapusan pajak bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan di bawah 8 juta (Sindo, 11 April 2019).

“Sementara program penghapusan pajak penghasilan akan memberikan manfaat hingga Rp25 triliun untuk rakyat Indonesia,” ujar Sohibul pada saat orasi Kampanye Rapat Umum PKS di Stadion Sidelig, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis 11 April 2019.

Diantara program-program yang diusung tersebut tentu saja PKS telah mengkaji terlebih dahulu seperti halnya untuk pemberlakuan STNK gratis memiliki manfaat sekitar 33 triliun bagi rakyat Indonesia. Sedangkan untuk program penghapusan pajak penghasilan dibawah 8 juta menghasilkan manfaat mencapai 25 triliun bagi rakyat Indonesia. Selain tiga program unggulan di atas, Sohibul Iman juga menyampaikan bahwasanya PKS akan memperjuangkan Rancangan UU terkait dengan perlindungan Ulama, Tokoh Agama, serta Simbol Agama. Adanya RUU tersebut harapannya mampu menjaga keberpihakan antara negara dengan para Ulama, Tokoh Agama, maupun simbol agama apabila ada ancaman baik secara fisik maupun non fisik (Kompas, 13 Januari 2019).

“Adapun simbol-simbol keagamaan yang kami maksud adalah simbol yang dihormati oleh seluruh agama resmi yang diakui di Indonesia,” kata Sohibul pada tim Kompas, 13 Januari 2019.

Disamping adanya konflik internal partai, upaya yang dilakukan PKS dalam melampaui ambang batas parlemen selain dari citra program yang ditawarkan juga dapat dilihat dari citra personal Caleg yang diusung untuk maju ke parlemen. Partai yang belum tertarik merekrut artis sebagai caleg, melainkan dari para kader dan juga tokoh masyarakat yang dirasa jauh lebih berkompeten sehingga menimbulkan citra sendiri dikalangan masyarakat sekitar. Beberapa caleg yang merupakan tokoh terkenal di daerah tentu saja akan lebih mudah untuk mengumpulkan simpati dari masyarakat, apalagi kalau citra mereka dipandang baik.

Caleg DPR RI dapil Jawa Barat X atas nama KH. Achidin Noor, MA merupakan Tokoh Agama yang banyak dikenal masyarakat sekaligus pendiri Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan. KH. Achidin juga banyak berkiprah sebagai aktivis keagamaan sehingga tidak ada keraguan ketika beliau ditunjuk sebagai caleg. Kiai lulusan pendidikan Magister Da'wah yang ditempuh di salah satu kampus ternama di Madinah, Saudi Arabia tersebut memaparkan beberapa misi diataranya, akan memperkuat NKRI melalui perundang-undangan yang *rohmatan lil alamin*. Memajukan perekonomian, pendidikan, serta kesehatan di Indonesia, pengawalan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah. (Dialektika Kuningan, 07 April 2019).

“Adapun visi saya, menjadi anggota DPR RI yang berintegritas, setia kepada kebenaran dan kejujuran. Serta, Insya Allah, kalau saya duduk di parlemen dan PKS menang, pajak motor akan dihapus, dan SIM berlaku seumur hidup” jawab Achidin secara tegas, 07 April 2019.

Untuk dapil Nusa Tenggara Barat I terdapat salah satu seorang caleg bernama Johan Rosihan yang cukup banyak prestasi serta sosok yang sangat terkenal di NTB. Dari sisi keorganisasiannya, Johan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gema Keadilan. Disisi kepartaian, peria dari lima anak tersebut juga banyak berperan serta dalam sebagai Ketua Bidang Kaderisasi DPD (1999), Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW(2002-2009), serta menjadi Ketua Komisi Kebijakan Publik MPW (2014-sekarang) dan masih banyak lainnya. Selain itu, Johan juga tercatat sudah menduduki tiga periode menjadi wakil rakyat di DPRD NTB (Udayana). Berdasarkan sejumlah gambaran tersebut, tentu saja Johan banyak sekali dikenal masyarakat serta mendapat dukungan yang lebih baik dari kalangan milenial, tokoh agama, tokoh masyarakat, terlebih dukungan dari emak-emak di NTB serta tim yang terus aktif memberikan dukungan (Nusra Media, 31 Maret 2019).

“Secara pribadi saya juga blusukan menemui emak-emak di sini (Pulau Sumbawa). Alhamdulillah, mereka sangat mendukung dan sayapun selalu disambut hangat. Untuk itu, kepada masyarakat di Pulau Sumbawa saya mengucapkan terimakasih, semoga apa yang diperjuangkan ini dapat kita menangkan bersama” kata caleg PKS nomor urut satu pada pihak Nusra Media, 31 Maret 2019.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bagaimana citra PKS dimata masyarakat baik dari program maupun caleg yang diusung di pemilu 2019. Adanya problem internal yang dihadapi partai sendiri tidak menutup kemungkinan untuk terus berjuang memperjuangkan hak-hak yang akan diperjuangkan di Parlemen. PKS yang konsisten mencalonkan kader dan juga

tokoh masyarakat/agama dibandingkan dengan partai lain yang merekrut banyak artis untuk dicalonkan. Banyaknya dorongan serta kepercayaan dari masyarakat kepada partai hingga pada akhirnya PKS mampu melampaui ambang batas parlemen di pemilu 2019.

C. Penempatan/distribusi

1. Local Network

Untuk bersaing dalam memenangkan suara di pemilu 2019, tentu saja setiap kader maupun caleg melakukan terjun langsung turun ke masyarakat mensosialisasikan partai terutama program kerja yang akan diangkat untuk menarik simpati. Hal tersebut tentu saja juga dilakukan oleh kader dan juga caleg PKS untuk memenangkan pemilu 2019. Upaya yang dilakukan dalam sosialisasi kepada masyarakat harapannya mampu mendulang suara partai yang diprediksi tidak lolos ambang batas parlemen.

Pada masa kampanye berlangsung, Ustadz Abdul Somad (UAS) ikut dalam mengkampanyekan PKS. Melalui video yang beredar di masyarakat, UAS secara jelas dan juga tegas menganjurkan bahkan menyerukan masyarakat untuk memberikan suaranya kepada partai mengamanatkan Amar Ma'ruf nahi mungkar seperti PKS. Selain itu, pasca pelaksanaan kampanye Prabowo Sandi di Gelora Bung Karno (GBK) Minggu, 7 April 2019 juga beredar video seruan Imam Besar Ummat Islam Indonesia, Habib Rizieq Syihab. Di dalam video yang berdurasi 3 menit tersebut nampak Habib Rizieq bersama dengan beberapa tokoh pihaknya dari kota suci Mekkah mempunyai

komitmen dalam hal perubahan umat. Habib juga berharap agar seluruh kader maupun caleg PKS terus berjuang untuk kemenangan di pemilu yang akan datang (Liputan Rakyat, 08 April 2019).

“Kami berharap kawan-kawan dari pegiat PKS berjuang supaya PKS menang dalam pemilu 2019 ini, dan lebih banyak mengirimkan kader-kader terbaiknya di DPR RI. Agar ke depan, dengan PKS banyak yang duduk DPR RI akan memperjuangkan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Islam,” ucap Habib Rizieq (Liputan Rakyat, 08 April 2019).

Kenaikan suara PKS di Nusa Tenggara Barat menurut Wakil Ketua Bidang Wilayah Dakwah DPP PKS Suryadi Jaya Purnama disebabkan karena buah manis hasil kerja keras para kader. Kepedulian terhadap para ulama juga membantu melonjakkan suara di NTB. Ditambah lagi dukungan dari tokoh agama terkenal seperti Ustadz Abdul Somad dan juga Rizieq Shibab yang mendukung PKS di bawah kepemimpinan Sohibul Iman. Terlebih lagi, ikut turunnya Gubernur Zulkieflimansyah yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS NTB ikut serta dalam mendongkrak suara kader di NTB. Adanya Garbi juga memberikan efek yang positif bagi PKS karena kader-kader PKS semakin solid menyusur hingga ke masyarakat bawah terlebih pada generasi milenial sehingga banyak caleg yang diajukan dari kalangan milenial. Untuk itu banyak iklan PKS yang dibuat dengan melibatkan generasi milenial sebagai sarana berkomunikasi dengan para milenial secara efektif (Duta Selaparang, 25 April 2019).

“Pantauan kami, Garbi *effect* berlaku positif, karena kami kian solid bergerak menysasar seluruh lapisan masyarakat. Khususnya, generasi milenial. Sehingga, kami banyak mengajukan banyak caleg dari

kalangan milenial pada pemilu kali ini,” ucap Suryadi Jaya Purnama, 25 April 2019.

Lain halnya Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba, Sitti Aisyah Amin yang melakukan sosialisasi kampanye kepada masyarakat melalui *door to door*. Di Kelurahan Bintarore, Sitti melakukan sosialisasi kepada warga untuk memperkenalkan program-program yang diusung PKS. Selain sosialisasi dirinya sendiri, Sitti juga memperkenalkan Caleg DPR RI Dapil II H. Abdul Aziz. Bagi Sitti, semua caleg mempunyai kegiatan rutin untuk melakukan sosialisasi baik bersama kader maupun para simpatisan PKS kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya PKS merupakan partai yang konsisten sebagai partai dakwah untuk kepentingan masyarakat (Panrita, 26 Maret 2019).

“Sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa PKS hadir untuk kepentingan masyarakat dan insyaallah kader PKS akan tetap menjaga konsistensi sebagai partai dakwah,” kata Sitti kepada pihak Panrita, Selasa 26 Maret 2019.

Caleg DPR RI dapil Jawa Tengah I meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan juga Kota Salatiga atas nama Nur Yulianto banyak dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Pribadi yang banyak mengisi kajian baik di majlis taklim bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan juga generasi muda sehingga bukan hal yang sulit untuk terjun dikalangan masyarakat. Selain menjadi seorang fotografer, beliau juga aktif menjadi khotib beberapa masjid di Ungaran. Ustadz muda yang maju menjadi caleg DPR RI ini tidak akan membeli suara rakyat dengan memberikan sejumlah

uang, akan tetapi dia memaksimalkan sosialisasi baik dalam bentuk APK maupun kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan masyarakat (Ungaran, 14 Februari 2019).

“Bagi saya ini adalah amanah dari partai yang harus saya jalankan dengan baik, yang penting saya berusaha berkontribusi untuk memaksimalkan perolehan dukungan masyarakat, masalah nanti siapa yang jadi tidak jadi masalah buat saya” ujarnya, 14 Februari 2019.

Caleg DPR RI Riau Hj. Aida Malikha beserta Caleg DPRD Provinsi Riau Ir. H. Mansyur dan juga Caleg DPRD Kota Pekanbaru Yasser Hamidy melakukan kegiatan bakti sosial serta seminar kesehatan tepatnya di Perumahan Manunggal Asri Rt 01 Rw 05, Tuah Madani, Tampan, Pekanbaru pada hari Minggu, 27 Januari 2019. Dalam acara tersebut, Hj. Aida menyampaikan apabila PKS menang nantinya akan amanah memperjuangkan program Nasional PKS. Pada saat kampanye terkait dengan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan juga pemberlakuan SIM seumur hidup. Acara bazar tersebut berlangsung dengan tertib dimana bazar yang awalnya seharga 40 ribu rupiah kemudian diberi subsidi menjadi 8 ribu rupiah (Sergap Online, 28 Januari 2019).

“Kalau sudah dilegislatif harus amanah dengan apa yang dijanjikan untuk perubahan selanjutnya, sesuai dengan program Nasional, PKS juga berjanji jika nanti menang akan berupaya menghapuskan pajak kendaraan bermotor roda dua dan surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup,” terangnya pada pihak Sergap Online, 28 Januari 2019.

Sejumlah caleg menghadiri kegiatan Bakti Sosial dan juga pengobatan gratis dalam mengisi kegiatan kampanye di rumah Caleg PKS Ani Susniati, di

Desa Talaga Kulon, Kabupaten Majalengka yang mendapatkan antusias dari masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut nampak hadir Caleg PKS no urut 2 DPR RI dapil Jabar yakni Ir. H. Wahyudin beserta caleg DPRD Provinsi Jabar, Aep Syarifuddin. Selain mengadakan kegiatan baksos dan pengecekan kesehatan, mereka juga mensosialisasikan kepada warga tata cara dalam pencoblosan pada saat pemilihan berlangsung. Layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan dengan obat herbal, USG, dan juga pembagian doorprize untuk lebih memeriahkan acara tersebut (Radar Cirebon, 26 Maret 2019).

“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami sengaja memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bagaimana tata cara pemilihan tersebut. Mudah-mudahan dengan telah diberikan pembekalan seperti yang kami lakukan sekarang masyarakat bisa lebih memahami bagaimana tata cara untuk melaksanakan pemilihan, dan kiranya masyarakat diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih kader-kader PKS terbaik di parlemen,” terang Wahyudin pada Radar Cirebon, 26 Maret 2019.

Di Jawa Barat, caleg DPR RI Ermi Yusfa dapil Jabar VI yang terdiri dari Kota Depok dan Kota Bekasi yang pertama kalinya terjun di dunia politik atas saran para Tokoh Ulama seperti Habib Riziiq serta KH Arifin Ilham salah satu Pimpinan dari Majelis Dzikir Az-Zikra. Sosok aktivis sosial yang banyak memberikan beasiswa dan juga bantuan yang diberikan kepada majelis taklim serta masdrasah melalui yayasan Darul Rizki. Apabila lolos di Parlemen dia akan menyumbangkan seluruh gajinya untuk kegiatan dakwas, sosial, serta pendidikan. Untuk bertarung dengan caleg yang lain, strategi yang dilakukan

Ermi yakni melakukan aktivitas sosial kepada masyarakat (Depok, 25 September 2018).

“Mengalir saja, sama seperti sebelumnya. Datengin warga, bantu mereka yang membutuhkan. Niat saya ibadah, yang penting ikhlas, jika jadi (Jadi Anggota DPR RI.Red) itu bonus dari Allah, sebisa mungkin saya memegang amanah itu dengan baik,” jawab Ermi, 25 September 2019.

Di Desa Tugu kecamatan Cimanggis, Bekasi diadakan bakti sosial dan juga pengobatan gratis oleh DPC PKS Cimanggis bersama sejumlah caleg baik DPR RI, DPRD Kota Depok, serta Caleg DPRD Provinsi Jabar. Dalam kegiatan pengobatan gratis tersebut telah dihadirkan tim medis 2 dokter, 1 apoteker, juga 4 tenaga paramedis yang melakukan pemeriksaan terhadap 100 warga yang melakukan pemeriksaan. Diselenggarakannya kegiatan tersebut harapannya masyarakat mampu merasakan manfaat dari kegiatan bakti sosial tersebut serta bagi yang mengalami sakit segera sembuh, bisa lekas beraktivitas seperti biasanya. Nur Azizah Tahmid, salah satu Caleg DPR RI dalam kesempatan tersebut terus mengajak warga masyarakat yang ada hadir untuk rutin melakukan kegiatan olahraga supaya badan tetap bugar dan sehat. Nur Azizah juga menyampaikan kebugaran fisik tentu saja menunjang aktivitas dakwah untuk menyiarkan Islam baik di Kota Depok, Cimanggis terlebih khususnya (Bekasi Media, 05 November 2018).

Di Tangerang, Caleg DPR RI Hj. Kingkin Anida menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dan juga layanan kesehatan kepada masyarakat di Perumahan Perumahan Puri Permai, Desa Pete, Kabupaten Tangerang pada

hari Sabtu, 8 Maret 2019. Selain menyampaikan program yang diusung PKS, Kingkin juga mendorong bagi setiap perempuan untuk melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi apabila terpilih menduduki di Senayan. Bagi Kingkin, perlunya pendidikan perempuan hingga di perguruan tinggi karena ibu merupakan sosok pertama sebagai madrasah bagi anak-anaknya kelak, untuk itu harapannya mampu mempunyai jenjang yang tinggi pada tingkat pendidikannya (Pelita Banten, 09 Maret 2019).

“Program 12 tahun belajar saat ini belum terealisasi. Masih masyarakat kita yang belum mengikuti program belajar 12 tahun karena terkendala biaya. Kami ingin memperjuangkan program ini gratis dan masyarakat bisa sekolah 12 tahun,” terang Kingkin, 09 Maret 2019.

Rancangan pembebasan biaya bagi sekolah SD,SMP, SMA pun sudah dirancang di benak Kingkin. Ketua DPC PKS Kecamatan Tigaraksa, Warsino juga terus mengajak warga masyarakat untuk selalu mendukung program PKS serta Caleg-Caleg yang maju di pemilu 2019. Warsino juga menyatakan bahwasanya PKS menyapa masyarakat melalui kegiatan baksos dan juga pelayanan kesehatan seperti cek asam urat,kolesterol dan juga cek gula darah. Kegiatan baksos tersebut memperoleh simpatisan dari masyarakat terutama dari kalangan ibu-ibu (Pelita Banten, 09 Maret 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya para caleg para caleg/kader serta tim sukses dalam mensosialisasikan partai kepada warga lokal secara langsung melalui *door to door* ke rumah warga, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus memperkenalkan diri dan juga program yang di usung PKS. Keikutsertaan Ustadz Abdul Somad dan

dukungan Habib Rizieq juga mempengaruhi partisipasi masyarakat kepada PKS. Selain itu, beberapa caleg juga menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dan juga layanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

2. *Canvassing*

Cara mengumpulkan massa dari sejumlah caleg tentu saja beragam cara yang berbeda. Hal tersebut tentu tidak lepas dari kemampuan serta latar belakang para caleg sehingga mampu berkomunikasi langsung dengan basis massa yang ada di dapilnya. Di Bengkulu, Caleg DPR RI atas nama Dr. H. Dani Hamdani melaunching rumah rakyat pada hari Minggu, 28 Oktober 2018. Rumah rakyat tersebut akan digunakan sebagai tempat pelatihan usaha pemuda, dan juga sebagai tempat belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar tanpa biaya sepeserpun alias gratis. Bagi siapapun yang ingin belajar mengaji apabila malu datang ke masjid juga difasilitasi di rumah rakyat, serta apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi bisa langsung datang ke rumah aspirasi sambil ngopi (Rri, 28 Oktober 2018).

“Kami secara organisasi partai sangat mendukung, karena saat ini sudah saatnya kampanye, dan bagi seluruh Caleg PKS silahkan mengadakan kegiatan seperti ini, agar bisa selalu bersama masyarakat,” terangnya, 28 Oktober 2018 .

Adanya rumah rakyat tersebut menurut Dani tidak akan berhenti sampai pasca pemilihan berlangsung, melainkan akan terus dimanfaatkan seterusnya. Dengan begitu, masyarakat merasa terfasilitasi adanya rumah

rakyat dan dengan mudah untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Bukan hanya pada masa kampanye, melainkan setelah kampanye selesaipun kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan (Rri, 28 Oktober 2018).

Di Bogor, salah satu Caleg dapil 3 no urut 2 Mardiyanto S.Pi untuk menggelar simpati berbeda dari caleg lain yang mengunjungi majelis taklim ibu-ibu dan bapak-bapak, melainkan Mardiyanto menyelenggarakan turnamen futsal untuk menarik simpati dari kaum milenial. Turnamen yang diselenggarakan di lapangan futsal Tirtania, Pamoyann, Bogor Selatan tersebut di beri nama “Mardiyanto Cup”. Turnamen tersebut diikuti oleh 64 tim yang terdiri dari masing-masing kelurahan se Kecamatan Bogor Selatan setiap hari minggu yakni mulai 17 Februari hingga 7 April 2019. Kegiatan turnamen tersebut di dukung sepenuhnya oleh Caleg DPR RI H. Najamudin seperti yang dikatakan pada Lensa Online 3 Maret 2019.

“Ini gagasan yang sangat luar biasa yang di buat oleh Pak Mardiyanto. Sejak awal memang kita berdua merencanakan untuk turnamen ini. Tapi, kita fokuskan untuk Mardiyanto Cup, sehingga kaum millennial yang awalnya belum memilih, saat ini bisa menentukan pilihannya,” kata Najamudin (Lensa Online, 3 Maret 2019).

Di dapil Jawa Barat V no urut 7 Hj. Ida Farida Darwi, MA salah satu caleg DPR RI sekaligus sebagai Ketua BKMT Kabupaten Bogor menarik simpati antusias dari majlis ibu-ibu ta’lim di Desa Susukan dan juga sekitarnya. Dengan diselenggarakannya acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada 10 Januari 2019 di Majelis Ta’lim Al-Himah juga dihadiri oleh Tokoh Agama lokal, serta caleg DPRD Bogor Ust. H. Irvan Baihaqi. Peraihan penghargaan sebagai Qari terbaik 1 kategori dewasa dari Departemen Agama ini membuat

masyarakat antusias untuk memilih Hj. Ida Farida. Di penghujung tausiyahnya, Hj. Ida lebih menekankan pada jamaah yang hadir untuk memilih pemimpin muslim yang akan memperjuangkan islam demi kepentingan umat islam (DPC PKS Bojonggede, 11 Februari 2019).

Di Lampung, Komunitas Nuwo Milenial bersama dengan empat caleg DPR RI asal Lampung mengadakan diskusi bersama terkait program caleg Milenial tersebut yang akan dilaksanakan ketika berhasil lolos menuju Senayan tepatnya di G-Ummati Cafe pada hari Sabtu, 6 April 2019. Menurut Dian selaku koordinator Komunitas tersebut mengatakan bahwasanya keempat caleg tersebut hanya cenderung pada teori saja, karena masih belum tergambarkan program seperti apa yang akan ditumbuhkan untuk kaum milenial (Radar Lampung, 06 April 2019).

“Yang kita ketahui, kebanyakan caleg setelah berhasil meraih kursi legislatif cenderung tidak memberi solusi dan tidak bekerja, namun apakah dengan adanya caleg muda setelah terpilih akan merubah stigma itu,” ujar Dian di sela acara, 6 April 2019.

Keempat Caleg tersebut yakni Maulana Mustika dari PKS, Taufik Basari dari Nasdem, Edi Agus Yanto dari PN, serta Hidir Ibrahim dari PKS. Maulana selaku caleg PKS berjanji apabila mampu menduduki kursi di Parlemen akan mendirikan rumah milenial di Lampung yang akan digunakan oleh para milenial serta komunitas untuk menciptakan ide-ide kreatif. Akan tetapi, gambaran secara riil belum dapat disampaikan oleh Maulana yang saat ini masih hanya sekedar program yang akan diusung bukan hanya sekedar janji.

Hal tersebut tentu untuk menarik simpati dari kaum milenial Lampung untuk memberikan hak suaranya kepada Maulina (Radar Lampung, 06 April 2019).

Anggota DPR RI sekaligus sebagai Caleg DKI Jakarta dapil 3 meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, serta Kepulauan Seribu Drs. H. Adang Daradjatun menghadiri undangan yang dilakukan Komunitas Senam Ana Bugar. Kehadiran Adang tersebut sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwasanya di pileg 2019 berjuang untuk menduduki kursi di Parlemen lagi. Acara senam yang dilaksanakan pada hari Minggu, 25 November 2018 tepatnya di Lapangan Apartemen Semanan Indah, Jakarta Barat yang juga dihadiri oleh Bpk. Novi Nurwanto, MM salah satu caleg DPRD Jakarta Barat. Bpk. Adang dalam sambutannya mengajak kembali untuk lebih meningkatkan skala usaha para pelaku usaha mikro terlebih khusus di wilayah Kapuk melalui pemanfaatan KUR (Adangdaradjatun, 26 November 2018).

Di Jakarta, Hidayat Nur Wahid, MA salah satu caleg petahana mengawali kegiatan dengan kaum milenial melalui sosialisasi empat pilar MPR RI di Aula Masjid Daarut Tauhid pada hari selasa 2 April 2019. Hidayat mengajak generasi milenial tersebut yang tergabung dalam Komunitas Ladang Amal untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka serta Syukur untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di NKRI. Seperti yang kita ketahui bahwasanya peran para ulama dan juga kaum Islam yang memperjuangkan kemerdekaan hingga menyebarkan ajaran Islam di Seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, wahid juga mengatakan salah satu cara untuk menjaga NKRI

yaitu dengan menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan rela memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga meminimalisir golput di Tanah Air (PKS.id, 04 April 2019).

Di Tangerang khususnya dapil Banten 3 caleg no urut 3 Tuti Elfita mengadakan turnamen bola voli yang diikuti oleh 12 tim. Kegiatan tersebut disambut dengan meriah oleh warga desa Koper, Kabupaten Tangerang.

“Tujuan diselenggarakan Turnamen Tuti Elfita Cup ini untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Betul sekali kami ingin sportivitas tumbuh, dengan menggalang semangat sportivitas, persatuan, dan keakraban di kalangan remaja dan pemuda,” tegas Tuti, 13 Agustus 2018.

Diselenggaranya turnamen tersebut berawal ketika Tuti melakukan kunjungan ke Kresek menemui beberapa tokoh masyarakat dan menemukan salah satu keinginan dari pemuda Kresek untuk menyelenggarakan turnamen voli, untuk itu Tuti bersedia mensponsori kegiatan tersebut. Harapan Tuti, dengan menjunjung tinggi kegiatan-kegiatan kepemudaan di bidang olah raga tersebut mampu menumbuhkan bibit-bitit olahragawan seperti halnya program rutin yang sudah dilaksanakan di Banten yakni program senam nusantara (PKS Kota Banjar, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan uraian di atas, para caleg dalam mengumpulkan massa melalui beberapa kegiatan diantaranya melaunching rumah rakyat di Bengkulu. Di Lampung adanya komunitas Nuwo Milenial yang melakukan diskusi bersama anak-anak remaja milenial. Di Jabar salah satu caleg mengadakan pengajian Maulid Nabi bersama Majelis Taklim, dan juga di Tangerang diadakannya turnamen bola voli.

3. *Leader Tour*

Kunjungan ke berbagai pihak juga dilakukan oleh Presiden PKS, Dewan Pengurus Pusat Partai, maupun Majelis Syuro Partai guna untuk menarik simpati serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut tentu menjadi sorotan bagi publik ketika ada beberapa nama terkenal yang menjadi sorotan publik ketika kedatangan tamu dari rombongan PKS. Tentu saja kunjungan tersebut selain menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak juga mencari dukungan sebagai partai peserta pemilu di tahun 2019.

Sejumlah sejumlah tokoh yang berpengaruh terhadap PKS diantaranya: pertama, ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri menemui Kiai Kholil As'ad Syamsul Arifin seorang tokoh NU yang berasal dari Situbondo. Tentu saja Kiai Kholil merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Walisongo yang merupakan anak seorang Pahlawan Nasional KH As'ad Syamsul Arifin. Pertemuan tersebut memiliki makna sebagai langkah untuk menarik suara terutama pada kalangan Nahdliyin. Adanya pertemuan tersebut tentu memberikan makna simbolis kepada masyarakat hingga terkuak di media massa. Namun pada pertemuan tersebut, sejumlah kader PKS memberikan pernyataan bahwasanya Partai tersebut mempunyai kebijakan untuk melakukan pendekatan dengan ulama, sedangkan lingkup NU merupakan para Ulama. Oleh karena itu, mendekati para Ulama merupakan salah kunci untuk mendapatkan suara dari para santi dan juga dari masyarakat NU untuk lebih luas (Pinter Politik, 12 Desember 2019).

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri yang didampingi oleh Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi DPR RI PKS) serta beberapa rombongan *elite* partai yang melakukan silaturahmi dengan melakukan kunjungan kepada Habib Rizieq Shihab di Mekkah, Arab Saudi yang merupakan seorang Imam Besar di Arab Saudi pada hari Senin, 8 April 2019. Kedatangan rombongan Partai tersebut disambut dengan hangat oleh Habib Rizieq Shihab sekaligus memberikan apresiasi kepada PKS dan juga kader-kadernya yang telah bekerja keras mengawal amanat *ijtima'* ulama dalam membela agama, bangsa serta bernegara (Warta Ekonomi, 08 April 2019).

“Saya menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan jajaran FPI di seluruh Indonesia agar dapat bekerja sama dengan PKS untuk memenangkan pilpres dan pileg 2019. Agar PKS besar di parlemen dan dapat mendukung kebijakan yang membela agama, bangsa, dan negara,” kata Habib, 08 April 2019.

Hal tersebut membuat Habib berharap kepada PKS mampu memenangkan pilpres dan juga pileg 2019 sehingga mampu mendukung pemerintahan Indonesia yang lebih baik kedepannya. Jazuli mengatakan bahwasanya pertemuan PKS dengan Habib sudah dilakukan secara berkali-kali. Adapun tujuan silaturahmi tersebut yaitu untuk membahas dalam hal kepentingan umat serta bangsa dan negara. Hal tersebut dilakukan sebagaimana menjadikan bangsa Indonesia ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk menjadi bangsa mampu mensejahterakan rakyat, adil, serta bermartabat (Warta Ekonomi, 08 April 2019).

Kunjungan selanjutnya dilakukan oleh Ketua Dewan Syuro Habib DR.Salim Segaf Al-Jufri yang didampingi oleh Anggota Majelis Syuro

Akhmad Arqam serta Ketua DPW Jawa Timur Hari Setiawan. Silaturahmi tersebut dilakukan selama sepekan dari Probolinggo. Pertemuan tersebut tentunya dengan para Habaib, Ulama serta Tokoh Masyarakat yang di laksanakan di Bromo Park Hotel jl. DR Soetomo.

“Kita semua bersama masyarakat harus mengawal pemerintahan saat ini hingga akhir masa jabatannya,” kata Habib Salim pada kesempatan tersebut, sebagaimana dikutip dari PKS yang diterima Bisnis, Rabu malam (20 Februari 2019).

Silaturahmi tersebut dihadiri oleh pengurus PKS Kota Probolinggo, Caleg, relawan serta perwakilan sejumlah ormas dan juga tokoh masyarakat. Ustad Abdullah Said Baharmus yang berasal dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Probolinggo mempunyai keinginan supaya PKS lebih aktif dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, sebagaimana tuturnya dalam audiensi tersebut “Masyarakat membutuhkan PKS. Kalau semakin sering PKS hadir, masyarakat akan semakin tahu dan memberikan dukungan,” ujarnya. Selain Ustad Abdullah, salah satu pengurus Front Pembela Islam (FPI) Kota Probolinggo, Habib Lukman Hadad juga mengatakan bahwasanya “PKS harus lebih aktif mendekati masyarakat dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat” (Bisnis, 20 Februari 2019).

Pada hari Rabu, 06 Februari 2019 Presiden PKS (PKS) Mohamad Sohibul Iman melakukan kunjungan dengan pengasuh Pondok Pesantren Daarut Tauhid KH Abdullah Gymnastiar tepatnya di Pondok Pesantren Daarut Tauhid Jalan Gegerkalong Girang, Bandilung, Jawa Barat. Sohibul Iman mengatakan bahwasanya kunjungan tersebut untuk membahas agenda

keummatan serta mempererat tali silaturahmi. Dalam kunjungan tersebut, Sohibul didampingi oleh Sekretaris Majelis Syuro, Ketua DPP PKS Bidang Humas, Ketua DPP Bisang Kepanduan dan Olahraga, Ketua Wilda Banjabar serta Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat. Pertemuan tersebut juga disebutkan Sohibul sebagaimana janji kampanye PKS terkait RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, serta Simbol Agama. Untuk itu dirinya mengajak Aa Gym bersama tokoh muslim lainnya untuk melakukan penolakan terkait RUUP-KS (PKS.id, 07 Februari 2019).

“Tujuan kami sambangi Aa Gym adalah sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus membahas agenda keumatan”, ucap Sohibul, 07 Februari 2019.

Selain kunjungan kepada Aa Gym, Mohamad Sohibul Iman juga silaturahmi ke Kantor Pusat Persatuan Islam (Persis) di Jl. Perintis Kemerdekaan, Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu, 6 Februari 2019. Kedatangan sohibul beserta rombongan yang lainnya disambut hangat oleh Aceng Zakaria selaku Ketua Umum Persis. Dalam kunjungan tersebut, Sohibul tentu saja mensosialisasikan terkait janji kampanye PKS mengenai RUU Perlindungan Ulama, Tokoh, serta Simbol Agama. Sohibul iman berharap Persis menolak RUUP-KS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) bersama dengan PKS. KH Aceng menanggapi silaturahmi tersebut dengan baik serta berharap tali silaturahmi antara Partai Islam dengan Ormas Islam dapat dilakukan semakin kuat kedepannya terutama dalam berkomunikasi terkait permasalahan umat Islam (PKS.id, 07 Februari 2019).

Kunjungan silaturahmi yang dilakukan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri kepada Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tepatnya di Semarang disambut dengan hangat oleh Tafsir selaku Ketua DPW Muhammadiyah Jawa Tengah. Ungkapan Salim Segaf atas peran serta Muhammadiyah yang berperan penting terhadap Bangsa Indonesia selaku organisasi Kemasyarakatan.

“Muhammadiyah adalah elemen penting Bangsa Indonesia, ada banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, sekolah hingga kampus,” ucapnya (Antara, 11 Maret 2019).

Oleh sebab itu, bagi Salim antara PKS dan juga Muhammadiyah harus terus bersinergi dalam pembangunan peradaban untuk lebih baik kedepannya. “Kita akan duduk bersama, bergandengan tangan untuk berkontribusi bagi negeri ini,” tambahnya. Salim meyakini bahwasanya Indonesia mempunyai peluang dalam memimpin Islam yang mana Indonesia mempunyai umat Islam yang paling besar di dunia. Hal yang dapat dilakukan untuk mensinergikan bersama yaitu dengan cara memperbanyak keterwakilan umat (Antara, 11 Maret 2019).

Berdasarkan uraian di atas, *leader tour* yang dilakukan PKS sebelum pemilu berlangsung yakni melakukan kunjungan ke beberapa Ulama, Tokoh Agama, dan juga kunjungan ke Pondok Pesantren untuk menjalin silaturahmi dan dukungan di Pileg 2019. Beberapa Tokoh yang di kunjungi yakni Habib Rizieq (Imam Besar), Kiai Kholil (Tokoh NU), KH Abdullah Gymnastiar (pengasuh Ponpes Daarut Tauhid). Selain itu, PKS juga melakukan kunjungan di Kantor Persis bertemu Aceng, dan juga ke kantor DPW Jawa Tengah.

D. Promosi

1. *Pull Political Marketing*

Persaingan di pemilihan legislatif yang semakin memanas, partai politik peserta pemilu saling berlomba-lomba dalam mengkampanyekan program kerja yang diusul. Pada masa kampanye, partai politik tentu saja melakukan berbagai strategi kampanye yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat. Untuk mensosialisasikan program kerja yang ditawarkan, selain melalui baliho yang dipampang di pinggir-pinggir jalan raya, tentu saja di era perkembangan zaman seperti saat ini sangat mudah dilakukan melalui media sosial.

Gambar 3.7 Contoh Poster di Media Sosial Instagram



Sumber: Instagram pk_sejahtera, 26 Februari 2019.

Gambar 3.8 Contoh Poster di Media Sosial Twitter



Sumber : Twitter PKSejahtera, 22 November 2018.

Iklan yang dibuat PKS yang mulai tayang pada 1 April 2019 di beberapa stasiun televisi, tentu saja terlambat 8 hari waktu penayangan gratis yang telah disediakan resmi dari KPU. Adapun materi iklan yang dipublikasikan PKS mulai akhir Maret 2019 melalui media non-konvensional seperti PKS TV, Youtube, media sosial Facebook, Instagram, maupun Whatsapp. Akan tetapi, menjelang awal April 2019, iklan tersebut mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat melalui pesan WA berantai yang

dikenal sebagai pesan “Aktivis Kesehatan Jiwa”. Pesan berantai tersebut menganggap bahwasanya iklan yang dibuat PKS secara tidak langsung mengenai *bullying* serta menstigmatisasi terhadap seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan (ODGJ) serta dianggap iklan tersebut sebagai bahan guyonan atau lelucon (Alumni212, 02 April 2019).

Selain itu, iklan yang dibuat oleh PKS, nampak dalam video istri orang dibawa kabur oleh seorang penyandang disabilitas yang memiliki gangguan mental, akan tetapi sang suami tidak mampu mengejar sang istri dikarenakan SIM kendaraan bermotonya telah mati sehingga tidak bisa melawan razia polisi. Iklan yang banyak mendapatkan perhatian dari sejumlah kalangan masyarakat peduli kesehatan jiwa tersebut membuat petisi dengan istilah “Hapus video Partai PKS dan iklan kampanye pemilu lainnya yang menstigma disabilitas mental”. Hal tersebut tentu dianggap penggunaan istilah “gila” yang ada pada orang-orang psikososialnya merupakan salah satu penyandang disabilitas ini dianggap telah melanggar UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sehingga mampu terkena sanksi hukum (Tirto, 08 April 2019)

“Kami ingin mengangkat citra bahwa ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sama seperti orang pada umumnya, yang bisa berfungsi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. *Kok*, PKS ini malah mengangkat hal seperti itu dan dijadikan lelucon?” kata Bagus Utomo, selaku Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia yang ikut dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa hukum (Tirto, 08 April 2019).

Berkaitan dengan petisi yang dibuat pada tanggal 04 April 2019 tersebut membuat ketua DPP PKS angkat bicara. Ledia Hanifa

mengungkapkan bahwasanya iklan tersebut dibuat tanpa ada maksud untuk memunculkan stigma negatif kepada ODGJ. Akan tetapi, iklan tersebut dibuat untuk mengkampanyekan program yang ditawarkan partai terkait dengan pemberlakuan SIM seumur hidup serta penghapusan pajak kendaraan bermotor (Kompas, 05 April 2019).

"Kemarin ada beberapa hal yang sudah kami perbaiki. Kami sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas itu," ujar Ledia saat dihubungi Kompas (04 April 2019).

Media sosial yang digunakan Partai Keadilan Sosial dalam melakukan kampanye di kalangan masyarakat terkait pileg 2019 lebih dimaksimalkan melalui media Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dikarenakan sasarannya yaitu generasi milenial (Alumni212, 02 April 2019). Berdasarkan data dari penulis pada tanggal 7 Januari 2020, Twitter DPP PKS memiliki 359,8 ribu pengikut dengan cepat untuk menyebarkan segala informasi secara *up to date*. Instagram yang tidak kalah sebagai media publikasi juga mempunyai 232 ribu pengikut sehingga dengan mudah menyebarkan informasi di kalangan milenial. Sedangkan untuk Facebook yang sudah merajalela menyebarkan segala informasi publik sudah mencapai 915 ribu pengikut, hal tersebut menandakan masyarakat mengikuti berbagai informasi yang dilakukan PKS melalui media sosialnya.

Selain Facebook, Twitter, dan juga Instagram, banyak sekali kita jumpai link-link video iklan PKS yang diunggah di media sosial Youtube terkait program-program yang diusul PKS pada pemilu 2019 dan diperagakan

oleh generasi milenial sehingga banyak menarik perhatian terutama dikalangan muda. Beberapa contoh link youtube yang dapat kita saksikan iklan PKS seperti pada gambar 3.9 dan 3.10.

Gambar 3.9 Contoh Iklan Program PKS di Media Sosial youtube



Sumber: youtube PKS TV, 01 April 2019.

Gambar 3.10 Contoh Iklan Program PKS di Media Sosial youtube



Sumber : Sumber: youtube PKS TV, 12 April 2019.

Percepatan informasi di era digital seperti saat ini lebih memudahkan penyebaran informasi kepada publik. Selain itu, PKS jarang melakukan kampanye di media televisi karena berita terkait partai langsung dimuat dalam chanel PKS TV. Selain melalui sosial media, PKS melakukan kampanye melalui konten-konten kreatif seperti *flashmob* yang yang hampir setiap provinsi melakukan itu untuk menarik simpati dari masyarakat.

2. Publikasi Event

Kampanye kreatif yang dilakukan PKS sebagai ajang untuk mengenalkan program yang diusung PKS serta mengenalkan para caleg dilakukan melalui kegiatan *flashmob*. *Flashmob* mampu diartikan suatu

perkumpulan sekelompok orang di waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk berkumpul bersama untuk melakukan aksi lucu dan juga menyuakan aksi untuk saling berteriak menarik perhatian. Menurut Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) Pusat DPP PKS Chairul Anwar, *flashmob* dilakukan sebagai ajang untuk menyampaikan gagasan partai kepada masyarakat. Selain mengkampanyekan program, gerakan *flashmob* juga merupakan ajang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat (Tribun, 11 Maret 2019).

Kegiatan *flashmob* juga memberikan pesan makna bahwa Pemilu 2019, baik itu Pileg dan Pilpres bisa dapat dilakukan dengan cara gembira.

"Kami ingin membawa kegembiraan. Seluruh kader melakukan flashmob dengan kegembiraan dan kreativitas. Beberapa contoh konten kreatif yang dibuat yaitu satu autorobot yang ada di film transformer di gunakan di Lampung, ondel-ondel yang dihadirkan di Jakarta, *flashmob* yang dilakukan di atas perahu klotok tepatnya di Kalimantan Tengah, dan juga *flashmob* terpanjang dengan panjang puluhan kilometer nyambung tanpa putus sertamasih banyak lagi *flashmob*" tuturnya (Tribun, 11 Maret 2019).

Gambar 3.11 Contoh Aksi *Flashmob*



Kampanye kreatif kader PKS.

Sumber : (Tribun, 11 Maret 2019).

Rapat terbuka yang diselenggarakan di lapangan Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 diikuti oleh ribuan kader serta simpatisan PKS. Acara tersebut juga dihadiri oleh Sohibul Iman, Ahmad Syaikhu selaku Ketua DPW PKS Jawa Barat, Heri Koswara selaku Ketua DPD, dan juga beberapa caleg PKS baik DPR RI, Provinsi Jawa Barat, maupun caleg DPRD Kota Bekasi. Sohibul selaku Presiden PKS menyampaikan orasinya dimana PKS sudah mampu melewati ambang batas parlemen dan akan terus menargetkan melebihi angka *Parliamentary Threshold* di atas 4 persen. Selain itu, Sohibul juga memberikan penjelasan bahwa PKS beserta para caleg PKS se-Indonesia akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam usaha peningkatan perolehan kursi di parlemen pada pemilu 2019 (Warta Kota, 24 Maret 2019).

“Ada beberapa basis yang menjadi lumbung suara PKS, seperti Jawa Barat dan Banten kalau di sini kita bisa meraih 4 persen saja bisa bertambah dari daerah lainnya,” kata Sohibul kepada wartawan (Warta Kota, 24 Maret 2019).

Ketua umum DPW PKS Sulawesi Tengah, Muhammad Wahyudin mengatakan bahwa PKS menyambut baik seluruh tahapan yang dilakukan dalam berkampanye yang tentunya menggunakan dua model kampanye. Yang pertama, adanya rapat umum serta kampanye melalui media massa cetak maupun melalui media elektronik. Selain itu bagi PKS terutama lebih mengedepankan kampanye dengan bertatap muka walau hanya terbatas karena dianggap lebih efektif dan dilakukan secara masif (Elshinta, 24 Maret 2019).

Kampanye tatap muka atau dialogis juga dianggap lebih mudah dilakukan di masyarakat karena masyarakat dalam pemahaman lebih mudah mengenal citra diri, visi serta program kerja yang diusulkan di pemilu 2019. Adanya kampanye tatap muka terbatas tidak menutup kemungkinan PKS melakukan kampanye rapat umum terbuka kepada masyarakat menunggu jadwal yang dikeluarkan dari DPP PKS. Di Sulawesi Tengah sendiri mempunyai kesempatan selama tiga kali untuk melakukan kampanye yang dilakukan sesuai dengan basis kewilayahan daerah pemilihan (Elshinta, 24 Maret 2019).

Di Kabupaten Gunung Kidul tepatnya di sepanjang Bunderan Siyono, Kecamatan Playen pada hari Minggu, 31 Maret 2019 dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 dilakukan *flashmob* sekaligus sebagai kampanye terbuka. Kampanye tersebut diikuti oleh ratusan kader mapun caleg serta massa aksi yang menggunakan pakaian berlogo PKS bersorak mengikuti arahan dari komando orasi serta membagikan brosur dan juga bunga kepada pengendara yang melewati jalan tersebut. Orator PKS tersebut berulang-ulang mengampaikan janji kepada masyarakat terkait dengan program bebas pajak kendaraan serta penggunaan SIM seumur hidup. Melalui janji kampanye tersebut, Ari selaku Ketua DPD PKS Gunung Kidul mengajak kepada seluruh elemen masyarakat tidak meragukan caleg – caleg PKS sehingga memberikan hak suaranya baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional (Gunungkidul Sorot, 31 Maret 2019).

Sementara itu, Anang Sutrisno yang merupakan salah satu caleg DPRD Gunung Kidul berpesan kepada seluruh caleg PKS supaya memasifkan kegiatan kampanye melalui bertatap langsung dengan masyarakat. Harapannya supaya masyarakat mampu menyalurkan suaranya kepada PKS. Setelah acara *flashmob* berakhir, massa dilanjutkan dengan senam bersama di bagian selatan bunderan (Gunungkidul Sorot, 31 Maret 2019).

“Caleg harus datang ke masyarakat, temui masyarakat, agar mereka menyalurkan suaranya ke kita,” kata Anang pada Gunungkidul Sorot, 31 Maret 2019.

Kampanye akbar yang di selenggarakan di UTC Semarang pada hari Sabtu, 6 April 2019 mengencar-gencarkan janji kampanye yang diusung oleh PKS di pemilu 2019. Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Majelis Syuro menyampaikan program-program yang akan diperjuangkan ketika PKS berhasil lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2019.

“Jika kami memenangkan Pemilu 2019, janji-janji akan kami penuhi dalam waktu secepatnya,” jawab Hidayat, 06 April 2019.

Selain itu, Hidayat juga memberikan apresiasi kepada seluruh kader PKS di Jawa Tengah yang telah berpartisipasi menggelar kampanye secara kreatif dan juga atraktif untuk menarik simpati dari masyarakat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih juga mengungkapkan bahwasanya kader PKS di Jawa Tengah sangat atraktif dan juga kreatif dalam mempersiapkan kampanye tersebut dengan melibatkan wayang, *bumble* beserta kreasi-kreasi lainnya sehingga positif menumbuhkan

kepercayaan dari masyarakat dan juga meningkatkan elektabilitas partai (Suara Merdeka, 06 April 2019).

Kampanye terbuka perdana yang dilakukan PKS pada tanggal 29 Maret 2019 di taman gizi oyehe Papua diisi dengan beberapa orasi baik dari pengurus serta caleg partai yang mendapat apresiasi serta simpati dari massa yang telah hadir. Pada kesempatan tersebut para caleg berusaha memperkenalkan diri ke dan menarik simpati masyarakat serta mengajak untuk memberikan dukungan suara kepada partai. Selain itu, mereka juga memberikan penawaran program kerja untuk membuat perubahan yang lebih baik. Beberapa caleg tampak menghadiri kampanye tersebut seperti caleg DPR RI Dapil Riau, caleg DPR Provinsi yaitu Suharman Sandrang serta Alex Pigai. Kampanye tersebut ditutup dengan kegiatan *flashmob* yang terpusat di seputaran Tugu Cenderawasih Oyehe dengan mensosialisasikan kepada masyarakat program unggulan yang ditawarkan serta berpartisipasi aktif alias tidak golput selama proses demokrasi lima tahunan itu berlangsung (Pasific Pos, 01 April 2019).

PKS mendapatkan penghargaan sebagai Kampanye melalui *flashmob* terbesar di Indonesia dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Hal tersebut disampaikan oleh Dedi Supriadi selaku Wakil Ketua Bidang Humas DPP PKS pada hari Jum'at, 12 April 2019. Pada *flashmob* terpanjang tersebut diikuti oleh 800 ribu orang yang berasal dari 28 provinsi. Masing-masing provinsi tentu menunjukkan kreativitasnya untuk menampilkan potensi budaya daerahnya. *Flashmob* sepanjang 80 KM yang dilakukan PKS dalam menyambut peserta Kampanye Akbar Prabowo Sandi (PKS.id, 12 April 2019).

“Ketika menyambut peserta Kampanye Akbar Prabowo Sandi, kita juga membuat *flashmob* terpanjang, dari Kota Bogor, Depok, Pasar Minggu, Pancoran, Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi hingga ke GBK,” ucap Dedi, 12 April 2019.

PKS kota Bandung beserta ratusan kader serta simpatisan melakukan *flashmob* dari Pasteur menuju Sukamiskin yang diselenggarakan pada hari Minggu, 24 Februari 2019. Selama *flashmob* berlangsung, mereka saling mengedukasi dan menyapa masyarakat melalui janji politik yang ditawarkan PKS. Komandan *flashmob* terus mensosialisasikan terkait empat janji kampanye pada saat *direct selling* berlangsung kepada masyarakat sekitar. Respon yang diberikan masyarakat kepada massa *flashmob* tersebut memunculkan respon yang *positive* serta simpati. Tedy Rusmawan selaku Ketua Umum DPD PKS Kota Bandung merasa bangga terhadap simpatisan dan juga para kader PKS yang telah meramaikan acara *flashmob* secara antusias (PKS.id, 26 Februari 2019).

“Kami merasa terhibur melihat kegiatan ini dan saya baru liat hanya PKS yang melakukan kegiatan semacam ini,” kata Ahmad yang merupakan warga Kota Bandung. Kata salah satu warga Bandung, 26 Februari 2019.

Flashmob PKS sepanjang 5 KM yang digelar hari Sabtu, 23 Maret 2019 di Jalan Margona Kota Depok Jawa Barat. *Flashmob* tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan program yang diusung PKS untuk digencar-gencarkan kepada masyarakat. Kurang lebih sekitar 600 kader PKS melakukan aksi tersebut di pinggir jalan raya untuk menarik perhatian pengguna jalan. Kader PKS yang mengikuti *flashmob* menggunakan jubah yang dibuat dari karton

yang berisi tulisan program-program PKS diantaranya perlindungan Ulama, Tokoh Agama, serta simbol Agama untuk menjadikan Indonesia yang lebih adil dan makmur. Selain itu, pemberlakuan SIM seumur hidup, penghapusan pajak kendaraan motor, serta pembebasan pajak penghasilan dibawah 8 juta juga menjadi daya tarik masyarakat pada masa kampanye berlangsung (Antara, 23 maret 2019).

PKS menggelar aksi *flashmob* di jalan Lintas Sumatera pada hari Minggu, 13 Maret 2019 sepanjang 43 KM dengan rute Tugu SIB Medan hingga Tugu Stabat , Langkat. Kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 09.00 disambut hangat oleh Wilda selaku Ketua DPP PKS, Tifatur Sembiring selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Sumatera Utara DR H.Hariyanto menggunakan jeep dengan bak terbuka. Selain itu, mereka juga diiringi oleh peserta gowes sebanyak 60 orang. Setibanya di Tugu Stabat mereka disambut oleh Anshori Siregar selaku anggota DPR RI serta Ketua DPD. *Flashmob* tersebut diikuti sebanyak 4.300 kader PKS dan juga simpatisan yang ikut memeriahkan kampanye terbuka disepanjang jalan dengan mengkampanyekan program-program PKS (Medan Bisnis, 20 maret 2019).

“Sama seperti *flashmob* sebelumnya, PKS Sumut kali ini juga memperkenalkan 4 program andalan PKS secara nasional yaitu: SIM Seumur Hidup, Gratis Pajak Sepedamotor, RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh serta Bebas Pajak Penghasilan di Bawah 8 juta,” Ujar Hariyanto, 20 Maret 2019.

Aksi massa *flashmob* yang digelar di Kota Tangerang akhirnya bisa memecahkan PKS 8K dalam artian mampu mencapai melebihi 8 KM yakni

sepanjang 9,1 KM. *Flashmob* tersebut dilakukan pada hari Minggu, 23 Desember 2018. Menurut keterangan dari Humas DPD Kota Tangerang, Andy Windarto menjelaskan bahwasanya *flashmob* tersebut diikuti oleh kader PKS, simpatisan dan juga mayoritas rombongan ibu-ibu berhijab. Aksi tersebut terpampang dengan jelas tulisan di banner yang dibawa yakni “PKS MENANG, SIM SEUMUR HIDUP, PAJAK MOTOR GRATIS”.

“Ajang *Flashmob* PKS 8K ini adalah bagian dari sarana PKS mensosialisasikan PKS beserta program kampanye partai, serta PKS memandang bahwa pemilu adalah momen kontestasi gagasan, momen pemilu bukan hanya momen memperkenalkan caleg dengan kualitasnya, tapi juga menyampaikan program-program apa yang akan kami bawa ketika menang nanti,” jawab Sekretaris Umum DPD Arief Wibowo di lokasi aksi, 23 Desember 2018.

Selain itu, Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Tengku Iwan menyampaikan aksi tersebut merupakan sebuah bukti dari kader serta simpatisan yang semakin solid semangat menyuarakan untuk pemilu 2019. Mereka beranggapan bahwa pemilu merupakan sebuah momen kontestasi sebuah gagasan, bukan hanya perkenalan para caleg, akan tetapi juga penyampaian program yang diusung kepada masyarakat untuk menarik simpati kemenangan di parlemen (Banten Expres, 23 Desember 2018).

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan PKS menjelang pileg 2019 melalui kegiatan *flashmob*. Kampanye terbuka yang dilakukan tersebut tentu saja dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat terutama dengan aksi *flashmob* panjang di pinggir jalan dengan menggunakan atribut PKS sehingga pengendara yang lewat menjadi simpati. Selama kegiatan

flashmob berlangsung, massa yang ikut serta saling berteriak mengkampanyekan program-program yang di usung PKS pada pileg 2019.